



# RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL 2015 - 2019



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
2015

**Bekerja dengan Amanah,  
Memberi dan Melayani yang Terbaik**

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Renstra Setjen Kemendikbud) Tahun 2015—2019 disusun berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019, serta Permendikbud No. 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis 2015-2019.

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Permendikbud Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pasal 4 ayat (4): Unit kerja eselon I menyusun dan menetapkan Renstra untuk masa 5 (lima) tahun dengan mengacu pada Renstra Kementerian.

Selanjutnya, sejalan dengan Renstra Kemendikbud Tahun 2015—2019. Setjen menyusun Renstra untuk periode Tahun 2015—2019 yang dilakukan melalui berbagai tahapan, antara lain mengidentifikasi, verifikasi, menganalisis data, termasuk koordinasi dengan Satker, dan partisipasi seluruh pejabat di lingkungan Setjen.

Renstra Setjen Tahun 2015—2019 digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang hendak dicapai pada periode 2015—2019, serta merupakan dasar dan acuan bagi Unit Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Setjen untuk (1) Penyusunan dan penetapan Rencana Lima Tahunan (Rencana Strategis); (2) Penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan RKA-KL; (3) Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan; (4) Pemantauan dan Evaluasi (Renja, Renstra, dan LAKIP) .

Renstra ini penting untuk dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh jajaran dan para pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program dan kegiatan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel secara terintegrasi, sinergis dan berkesinambungan.

Sekretaris Jenderal,

Didik Suhardi  
NIP. 1963120319831004

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	2
C. Paradigma Tata Kelola Sekretariat Jenderal.....	3
D. Kondisi Umum .....	3
E. Potensi dan Permasalahan .....	9
1. Analisis Lingkungan Strategis .....	9
2. Permasalahan dan Tantangan Tata Kelola Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan .....	11
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN SEKRETARIAT JENDERAL .....	15
A. Visi Sekretariat Jenderal .....	15
B. Misi Sekretariat Jenderal .....	15
C. Tujuan Sekretariat Jenderal .....	15
D. Sasaran Strategis Sekretariat Jenderal .....	17
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	19
A. Arah Kebijakan dan Strategi Kemendikbud .....	19
B. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal .....	24
C. Kerangka Regulasi .....	45
D. Kerangka Kelembagaan .....	46
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....	48
A. Target Kinerja Sasaran Kegiatan (SK).....	48
B. Kerangka Pendanaan Sasaran Kegiatan (SK).....	54
BAB V PENUTUP .....	61
LAMPIRAN	
Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Sekretariat Jenderal	
Lampiran 2: Matriks Kerangka Regulasi	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan melalui Permendikbud No. 22 Tahun 2015, yang mencakup: visi, 5 misi, 6 tujuan, 16 sasaran, kebijakan dan strategi serta indikator kinerja strategis, program, dan kegiatan. Visi Kemendikbud 2019 adalah “Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”. Visi dijabarkan kedalam 5 misi yaitu: 1) Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat; 2) Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan; 3) Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu; 4) Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa; dan 5) Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik.

Selanjutnya dengan mengacu pada visi dan misi, Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Permendikbud Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pasal 4 ayat (4): Sekretariat Jenderal menyusun Rencana Strategis untuk periode 2015-2019.

Renstra Sekretariat Jenderal 2015-2019 ini, juga disusun dengan memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan. Selain yang terkait langsung dengan pengelolaan keuangan negara, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, agenda prioritas dalam RPJMN 2015-2019 terutama Nawacita nomor dua yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, diperhatikan pula Perpres No. 81 Tahun 2010 *Grand design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Kebijakan penguatan tata kelola di lingkungan Kemendikbud yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, yang memiliki peran sangat penting untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan keberhasilan pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Upaya yang dilakukan dalam rangka membangun tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya sesuai tugas dan fungsi Kemendikbud melalui Sekretariat Jenderal, yaitu : 1) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja Kemendikbud; 2) menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi dilingkungan Kemendikbud; dan 3) meningkatkan partisipasi/pelibatan publik baik dalam proses pengambilan kebijakan publik, perencanaan program, kegiatan, dan penganggaran.

Setjen Kemendikbud sebagai salah satu unit Eselon I di lingkungan Kemendikbud memiliki peran aktif dan posisi yang sangat strategis dalam memberikan kontribusi dalam peningkatan tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta penguatan dan pelibatan publik secara gotong royong. Hal tersebut, sesuai dengan peran dan fungsi Setjen dalam menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan merujuk visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program tahun 2015—2019, serta memperhatikan berbagai peraturan perundangan tersebut di atas, Sekretaris Jenderal bertekad:

***“Bekerja dengan Amanah, Memberi dan Melayani yang Terbaik”***

## **B. Landasan Hukum**

Rencana strategis ini merupakan perwujudan dari penerapan berbagai peraturan perundangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film;
7. Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010—2025
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014—2019;
11. Permendikbud Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
12. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 11 tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015—2019.

### C. Paradigma Tata Kelola Sekretariat Jenderal

Rencana Strategis Sekretaris Jenderal Tahun 2015—2019 disusun berdasarkan beberapa paradigma, untuk mewujudkan Sekretariat Jenderal yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, Setjen melakukan penataan organisasi/kelembagaan, regulasi, pembinaan kepegawaian, dan penataan barang milik negara Kemendikbud. Perincian paradigma itu adalah sebagai berikut.

1. Keterbukaan dan Responsif, merupakan penumbuhan iklim yang kondusif bagi terlaksananya transparansi informasi secara benar, jujur dan adil, serta responsif yaitu setiap unit di lingkungan Setjen harus berusaha untuk melayani *stakeholders*;
2. Profesional, memiliki kapabilitas, kompetensi dan integritas;
3. Pelayanan prima tanpa diskriminasi, mengutamakan pelayanan prima (*cheaper, faster, better*) kepada masyarakat tanpa diskriminasi;
4. Efektif dan Efisien, suatu proses dan pengorganisasiannya memaksimalkan anggaran untuk menghasilkan keluaran yang optimal;
5. Akuntabilitas, menjelaskan rencana kerja prosedur dan mekanisme kerja, dengan sistem pertanggung jawaban yang jelas serta pemberlakuan sistem pemberian ganjaran dan sanksi yang konsisten;
6. Pemberdayaan dan Pelibatan Masyarakat, fokus pada peningkatan pemberdayaan masyarakat dan mengakomodasi kontrol sosial masyarakat, serta pelibatan masyarakat (keterlibatan aktif setiap warga negara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya);
7. Sistem *Checks and Balance*, suatu bentuk yang berkembang dari dan keseluruhan unsur penyelenggaraan organisasi Kemendikbud.

### D. Kondisi Umum

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, peran dan fungsi Setjen telah dituangkan dalam dua kebijakan pokok Setjen, yaitu: 1) terselenggaranya Tata Kelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang andal; dan 2) terselenggaranya, terdayagunakannya, dan terkembangkannya, data, statistik dan informasi, pelatihan, perfilman nasional, serta analisis dan sinkronisasi kebijakan, e-pendidikan dan kebudayaan.

Dua kebijakan pokok tersebut, pada tahun 2010—2014 telah dilaksanakan dan secara umum capaian kinerja Setjen dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terselenggaranya Layanan Prima dalam Pengadaan dan Penataan BMN serta Sarana dan Prasarana, meliputi: a) Penerapan Sistem Informasi Manajemen Bidang Aset Kementerian; b) Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN); c) Kegiatan konservasi energi; d) Penerapan sistem *E-Procurement* dalam proses pengadaan barang dan jasa; e) Pemeliharaan/perawatan taman, halaman, dan jalan di lingkungan Setjen Kemendikbud; f) Pengelolaan Wisma Arga Mulya; g) Pembinaan Persuratan Kementerian; h) Perolehan Sertifikat ISO 9001-2008; i) Kegiatan pengelolaan LHKPN;

j) Tindak lanjut atas temuan BPK, dan Inspektorat Jenderal. Proses integrasi kebudayaan pada tahun 2012 ke dalam tata organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memerlukan koordinasi yang intensif khususnya dalam penataan BMN. Sedangkan untuk tahun 2014, proses pengadaan barang dan jasa tidak ada sanggahan dari penyedia barang dan jasa.

2. Kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 2010-2014, yakni: menyelesaikan berbagai kebijakan dan program pendidikan dan kebudayaan; hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program pendidikan nasional, menyediakan informasi, analisis dan evaluasi pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pendidikan dan kebudayaan, Sinergi Kemendikbud dengan Kementerian/Lembaga lain, Beasiswa Unggulan, dan Dharma Siswa RI.

Di bidang kerja sama luar negeri, Biro PKLN berhasil menjalin kerja sama bilateral dengan banyak negara, diantaranya Amerika Serikat, Australia, Belanda, Brunei Darussalam, Filipina, Inggris, Jepang, Jerman, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Papua Nugini, Perancis, Singapura, Arab Saudi, Timor Leste, Turki, Vietnam, dan Thailand. Sedangkan kerja sama multilateral dan regional yang telah terjalin adalah dengan Badan Perdagangan Dunia (WTO), Menteri-Menteri Pendidikan se-Asia Tenggara (SEAMEO), *ASEAN Minister Meeting on Education (ASED)*. Selain itu, Biro PKLN telah melakukan uji coba sistem e-PDLN untuk memfasilitasi dan memonitoring perjalanan dinas luar negeri dan telah menyelesaikan buku yang berjudul "Menyiapkan Generasi Emas".

3. Pelaksanaan urusan pembiayaan, akuntansi, pelaporan keuangan, dan pembinaan pengelolaan keuangan serta penyusunan laporan, dan pembinaan akuntabilitas kinerja Kemendikbud telah dilaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, melalui pencapaian realisasi anggaran, kegiatan, dan program kementerian, laporan keuangan unit utama telah terintegrasi dengan SIMKeu, dan tertib dalam pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), sosialisasi peraturan bidang keuangan di lingkungan Kemendikbud, penyusunan mekanisme perbendaharaan dan pelatihan kebendaharawan, pembinaan dan monitoring pelaksanaan surat perintah membayar (SPM), penyusunan kebijakan Kemendikbud dalam bidang pengelolaan keuangan, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, pembinaan dan fasilitasi akuntabilitas kinerja Kemendikbud.
4. Terdayagunakannya pegawai secara efektif dan profesional melalui pengangkatan CPNS, pengembangan karier dan profesionalisme pegawai, penegakan disiplin pegawai, aturan mengenai perpanjangan pensiun pegawai (Aparatur Sipil Negara/ASN), pengembangan sistem informasi kepegawaian. Pencapaian penting lainnya adalah diterapkannya sistem informasi kepegawaian (SIMPEG), pembuatan aplikasi kepegawaian berbasis *web*, serta pengadaan *hardware* dan *software* pendukung *web*. Sistem remunerasi berbasis kinerja di lingkungan Kemendikbud

telah diterapkan sejak Juli 2013. Selain itu, Biro Kepegawaian telah menetapkan 900 jenis Jabatan Fungsional Umum (JFU), termasuk Dikti, yang akan divalidasi Kemenpan dan RB pada Januari 2015. Selain itu, Biro Kepegawaian telah menetapkan 534 jenis Jabatan Fungsional Umum (JFU), termasuk Dikti, yang telah selesai divalidasi dan telah diterbitkan persetujuannya oleh Kemenpan dan RB pada bulan Mei 2015.

5. Pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, organisasi, dan ketatalaksanaan serta pemberian bantuan hukum di lingkungan Kemendikbud dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan Organisasi. Kegiatan utamanya adalah penyusunan peraturan dan rancangan perundang-undangan.
6. Terselenggaranya e-pendidikan di satuan pendidikan serta Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas) yang telah melahirkan sejumlah pengembangan sistem pendataan dan sistem pembelajaran skala nasional. Berdasarkan node, Jardiknas dikelompokkan menjadi Zona Kantor Dinas Pendidikan (*OfficeNet*), Zona Sekolah (*SchoolNet*), Zona Perguruan Tinggi (*InHeren*), dan Zona Personal untuk siswa, guru dan dosen.

Sistem pendataan nasional yang telah dilaksanakan adalah adanya Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). Sedangkan sistem pembelajaran yang dikembangkan adalah a) Pengembangan, penyelenggaraan dan pemanfaatan siaran pendidikan Televisi Edukasi (TVE); b) pengembangan dan pemanfaatan siaran radio pendidikan (radio edukasi), c) Pengembangan pendidikan terbuka dan jarak jauh; c) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran (portal pendidikan Rumah Belajar); d) Pengembangan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh jenjang pendidikan menengah (SMA Terbuka); e) Pengembangan sistem pembelajaran inovatif di SMP Terbuka; f) Pengembangan pembelajaran berbasis TIK di daerah 3 T; g) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan. Satuan pendidikan formal dan unit kerja yang telah terkoneksi ke sistem pembelajaran daring (online) mencapai 23.178 satuan pendidikan. Satuan kerja yang menerapkan Penerimaan Peserta Didik Baru secara Online (PPDB Online) dengan jumlah satuan pendidikan sebanyak 1172 satuan pendidikan.

7. Tersedianya data pokok dan statistik pendidikan yang dicapai melalui penyelenggaraan pendataan pendidikan hingga 100%. Unit kerja pusat dan SKPD yang tergabung dalam jaringan pendataan diukur melalui indikator berikut: a) Terimplementasinya Sistem Informasi Pendataan Pendidikan; b) Terkoordinasinya SKPD Pendataan Pendidikan; c) Terbinanya SKPD Pendataan Pendidikan; d) Terintegrasinya Pangkalan Data Pendidikan Daerah (SKPD Daerah) dengan Pangkalan Data Kemendikbud.

Melalui pendataan tersebut diperoleh naskah statistik dan pendayagunaan data, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Statistik Pendidikan Nasional sebanyak 10 naskah:
  - 1) Statistik TK/ RA/ BA;
  - 2) Statistik SD/ MI;
  - 3) Statistik SMP/ MTs;
  - 4) Statistik SMA/ MA;
  - 5) Statistik SMK/ MAK;
  - 6) Statistik Pendidikan Menengah (SMP/ MTs, SMA/ MA, dan SMK/ MAK);
  - 7) Statistik SLB;
  - 8) Statistik Persekolahan (TK/RA/BA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK,SLB);
  - 9) Statistik Pendidikan Tinggi (PTN, PTS, dan PTK);
  - 10) Statistik Pendidikan Nonformal (Pendidikan Keaksaraan, PAUD Nonformal, Pendidikan Kesetaraan, serta Kursus dan Kelembagaan).
- b. Analisis dan Pendayagunaan Data Statistik Pendidikan Dasar sebanyak 13 naskah, yakni:
  - 1) Direktori Data Peserta Didik dan PTK Jenjang TK
  - 2) Direktori Data Peserta Didik dan PTK Jenjang SD
  - 3) Direktori Data Peserta Didik dan PTK Jenjang SMP
  - 4) Direktori Data Peserta Didik dan PTK Jenjang SMA
  - 5) Direktori Data Peserta Didik dan PTK Jenjang SMK
  - 6) Direktori Data Peserta Didik dan PTK Jenjang PLB
  - 7) Direktori Data Peserta Didik dan PTK Jenjang PT
  - 8) Direktori Data Peserta Didik dan PTK Jenjang PAUDNI
  - 9) Direktori Data Peserta Didik dan PTK Program Keaksaraan
  - 10) Studi *Rate of Return* Pendidikan
  - 11) Perencanaan Kebutuhan Guru
  - 12) Analisis Penelusuran Daerah dan Sekolah Target Pembinaan untuk Peningkatan Mutu SD/MI
  - 13) Analisis Penelusuran Daerah dan Sekolah Target Pembinaan untuk Peningkatan Mutu SMP/MTs.
- c. Analisis dan Pendayagunaan Data Pendidikan Menengah sebanyak 12 naskah, yakni:
  - 1) Proses Pembelajaran dalam Angka
  - 2) Indikator Kunci Proses Pembelajaran
  - 3) Informasi Individu Taman Kanak-kanak Menurut Kabupaten/Kota dan Provinsi
  - 4) Informasi Individu Sekolah Dasar Menurut Kabupaten/Kota dan Provinsi

- 5) Informasi Individu Sekolah Menengah Pertama Menurut Kabupaten/Kota dan Provinsi
  - 6) Informasi Individu Sekolah Menengah Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Provinsi
  - 7) Informasi Individu Sekolah Menengah Kejuruan Menurut Kabupaten/Kota dan Provinsi
  - 8) Informasi Individu Pendidikan Luar Biasa Menurut Kabupaten/Kota dan Provinsi
  - 9) Analisis Penelusuran Daerah dan Sekolah Target Pembinaan untuk Peningkatan Mutu SMA/MA
  - 10) Analisis Penelusuran Daerah dan Sekolah Target Pembinaan untuk Peningkatan Mutu SMK
  - 11) Sistem Penerimaan Siswa Baru Sekolah Menengah
  - 12) Efektifitas Penggunaan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dalam Penyelenggaraan Pendidikan di SMA.
- d. Analisis dan Pendayagunaan Data Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Non formal sebanyak 6 naskah terdiri atas:
- 1) Analisis SDM PNF
  - 2) Analisis SDM PT
  - 3) Profil Pendidikan Nonformal
  - 4) Profil Pendidikan Tinggi
  - 5) Keselarasan Lulusan PT dengan Tuntutan Lapangan Kerja yang Tersedia di Dunia Usaha dan Dunia Industri
  - 6) Analisis Disparitas Kualitas Lulusan PT Ditinjau dari Lama Studi dan IPK.
- e. Analisis dan Pendayagunaan Data Pendidikan sebanyak 8 naskah, yakni:
- 1) Penyusunan Indikator Kuantitatif Pendidikan Internasional (*World Education Indicators*) Kemendikbud - UNESCO - OECD,
  - 2) Penyusunan Naskah Pendayagunaan Data Statistik Pendidikan,
  - 3) Analisis Kebijakan Pendayagunaan Pendidikan Untuk Pimpinan.
  - 4) Kesiapan LPTK dalam Mendukung Peningkatan Kualifikasi Guru
  - 5) Analisis Deskriptif untuk Menjawab Isu dan Permasalahan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan yang Sedang Berkembang
  - 6) Inventarisasi Isu dan Permasalahan yang Terkait dengan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan
  - 7) Naskah Publikasi Data dan Informasi Pendidikan
  - 8) Kesiapan Daerah dalam Menyerap Pendidik Bertaraf Internasional.
- Selain itu, data PTK dapat diakses melalui *smartphone* dengan alamat *website* <http://referensi.data.kemdikbud.go.id>.

8. Pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, organisasi, dan ketatalaksanaan serta pemberian bantuan hukum di lingkungan Kemendikbud dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan Organisasi. Kegiatan utamanya adalah penyusunan peraturan dan rancangan perundang-undangan. Regulasi penting yang telah diselesaikan selama kurun waktu 2010-2014 adalah 161 Peraturan Menteri dan 332 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Terpeliharanya kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan nasional melalui survey lembaga independen dan kredibel mencapai 73%, masyarakat telah mengetahui dan memahami kebijakan tentang pendidikan. Program peningkatan citra publik dan layanan publik telah dilaksanakan 3 kegiatan utama yakni: a) Kegiatan penunjang kehumasan; b) Kegiatan penunjang penyuluhan dan penyebaran informasi; dan c) Kegiatan penunjang Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU). Kegiatan tersebut dijabarkan dengan mengembangkan Gerai Informasi dan Media (GIM), Perpustakaan Kemendikbud, serta mengembangkan sistem informasi pendidikan nasional dalam menunjang kegiatan publikasi melalui media elektronik (*Website, e-Kiosk, Display Directory, dan Information Booth*).
10. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 15 Tahun 2012 Setjen Kemendikbud tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film (LSF) yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan penyensoran film dan iklan film, serta rekaman video dan saran promosi yang dipublikasikan kepada masyarakat mencapai 39.167 judul, dan melaksanakan MoU dengan Pemda di 10 Provinsi tentang pembentukan LSF di daerah.
11. Pusat Arkeologi Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan penelitian di bidang arkeologi. Pelestarian dan pengembangan budaya untuk menumbuhkan pemahaman dan perkembangan masyarakat terhadap budaya yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencerdaskan bangsa dan menumbuhkan sifat kritis terhadap fakta sejarah dalam rangka memperkokoh ketahanan bangsa melalui penelitian dan pengembangan bidang arkeologi. Selain itu Pusat Arkeologi Nasional telah melaksanakan event internasional yaitu Seminar Sriwijaya.
12. Galeri Nasional Indonesia yang menjadi pusat kegiatan dan pengembangan karya seni rupa telah melaksanakan pengumpulan, pendokumentasian, registrasi, analisis, pemeliharaan, perawatan, pengamanan, penyajian, penyebarluasan informasi dan bimbingan edukasi tentang karya seni untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang kreatif, apresiatif, dan memiliki jati diri bangsa di era globalisasi dengan indikator meningkatnya fasilitas, daya tarik dan pemanfaatan oleh masyarakat.
13. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 104 Tahun 2013 Setjen Kemendikbud merupakan Institusi induk bagi 6 (enam) Pusat *The Southeast Asian Ministers of Education Organization* di Indonesia. Sejak penetapan peraturan

tersebut penyusunan dan pengelolaan anggaran bagi 6 Pusat dikoordinasikan oleh Setjen Kemendikbud. Keenam pusat tersebut adalah : SEAMEO BIOTROP; SEAMEO QITEP in Language; SEAMEO QITEP in Mathematics; SEAMEO QITEP in Science; SEAMEO RECFON; dan SEAMEO SEAMOLEC, telah melaksanakan kegiatan yang melibatkan unit utama lain dan negara ASEAN.

## **E. Potensi dan Permasalahan**

### **1. Analisis Lingkungan Strategis**

Kondisi lingkungan strategis Sekretariat Jenderal Kemendikbud dapat diidentifikasi sebagai potensi, yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang penting dalam penyusunan Renstra Sekretariat Jenderal 2015-2019. Kondisi lingkungan strategis yang menggambarkan kecenderungan masa depan untuk mewujudkan peningkatan Tata Kelola pendidikan dan kebudayaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan penguatan pelibatan publik berlandaskan gotong royong perlu mendapat perhatian yang khusus. Berikut diuraikan beberapa aspek lingkungan strategis dimaksud.

#### **a. Proses Perubahan Manajemen**

Perubahan manajemen merupakan salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian khusus dalam memahami perubahan, merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan serta memudahkan pelaksanaan peningkatan Tata Kelola pendidikan dan kebudayaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan penguatan pelibatan publik.

#### **b. Penguatan Akuntabilitas Kinerja**

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil (*result oriented*) diperlukan perhatian khusus dalam pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

#### **c. Penguatan Kelembagaan**

Sejalan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014—2019, Peraturan Presiden

Republik Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden Republik Nomor 7 tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan memperhatikan Nawa Cita agenda prioritas 6 serta Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu perhatian khusus dalam melakukan restrukturisasi organisasi Kementerian melalui kegiatan evaluasi dan penyusunan struktur organisasi, tugas dan fungsi.

**d. Penguatan Tata Laksana**

Penguatan bidang tatalaksana diharapkan dapat mendukung terciptanya layanan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang cepat, transparan, dan akurat. Hal ini tentu memerlukan penyediaan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal dan aman. Untuk itu bidang tatalaksana yang perlu memperoleh perhatian khusus yaitu: 1) Pembangunan Peta Ketatalaksanaan Kemendikbud yang meliputi, (a) Penyempurnaan dan Penyusunan Peta Bisnis Proses Kemendikbud, (b) Penyempurnaan dan Penyusunan Subproses Peta Bisnis; 2) Pengembangan *e-government* secara terintegrasi yang meliputi, (a) Pengembangan dan integrasi sistem pendataan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (b) Pengembangan dan implementasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis TIK, (c) Pengembangan dan implementasi sistem kepegawaian berbasis TIK, (d) Pengembangan dan implementasi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis TIK. 3) Manajemen kearsipan birokrasi berbasis TIK melalui kegiatan pengembangan sistem dan implementasi persuratan online (*e-office*) pada seluruh unit utama.

**e. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur**

Penguatan profesionalisme SDM aparatur yang perlu mendapat perhatian khusus antara lain mencakup aspek perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi dan penempatan pegawai, penilaian kinerja pegawai, penggajian/ remunerasi, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, penyusunan kompetensi serta sistem prosedur administrasi kepegawaian. Terkait dengan reformasi birokrasi maka penguatan SDM tentunya harus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai faktor penunjang terlaksananya reformasi birokrasi secara efektif dan efisien.

**f. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan**

Dengan adanya perubahan paradigma dan perkembangan serta tuntutan pembangunan pendidikan dan kebudayaan perlu perhatian khusus terhadap proses revitalisasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan dan peraturan dibidang pendidikan dan kebudayaan. Hal yang perlu mendapat perhatian antara lain: 1) adanya peraturan perundangan yang belum harmonis, 2) peta peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan dan secara substansi, 3)

implementasi peraturan perundang-undangan, 4) Penataan kewenangan pendidikan dan kebudayaan.

**g. Peningkatan Kualitas Layanan dan Pelibatan Publik**

Peningkatan kualitas pelayanan dan pelibatan publik di bidang pendidikan dan kebudayaan yang perlu mendapat perhatian khusus antara lain terdiri atas: 1) Layanan Peserta Didik; 2) Layanan Satuan Pendidikan; 3) Layanan Substansi Pendidikan; 4) Layanan Guru dan Tendik; 5) Layanan Pendidikan Orang Tua/Keluarga; 6) Layanan Kebudayaan; 7) Layanan Kebahasaan.

**2. Permasalahan dan Tantangan Tata Kelola Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan 8 area perubahan tersebut antara lain:

**a. Belum Maksimalnya Proses Perubahan**

Birokrasi yang ada saat ini masih belum diselenggarakan secara optimal, masih kurang responsif, masih kurang informatif, masih kurang *accessible*, masih kurang koordinatif, masih kurang terbuka, rumit, serta masih kurang efisien. Kondisi saat ini perlu diperbaiki/dibenahi. Beberapa penataan, seperti tatalaksana, organisasi, dan SDM dalam reformasi birokrasi akan ditingkatkan dalam rangka menciptakan perubahan yang diharapkan. Gerakan perubahan merupakan salah satu program yang disusun untuk membantu Kemendikbud dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan perubahan-perubahan dimaksud.

**b. Penataan Peraturan Perundang-undangan belum optimal**

Belum harmonisnya peraturan perundang-undangan berkaitan dengan bidang pendidikan, belum adanya peta peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan, masih adanya peraturan perundang-undangan yang kadaluarsa, dan masih sering terjadi implementasi peraturan perundang-undangan yang ada tidak sesuai dengan harapan.

**c. Belum efektifnya Penataan dan Penguatan Organisasi**

Belum semua tugas dan fungsi unit kerja kurang mencerminkan misi dan tujuan organisasi; pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya mengacu pada tugas dan fungsi unit kerja; masih terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi pada unit-unit kerja akibat pembinaan terhadap komponen-komponen pendidikan dilaksanakan terpisah pada tingkatan Unit Utama, dan tanggung jawab terhadap penjaminan mutu pendidikan untuk jenjang yang sama tersebar di beberapa Unit Utama; serta kurangnya pendelegasian wewenang kepada tingkatan manajemen yang lebih rendah.

**d. Penataan Tata Laksana belum optimal**

Dalam prakteknya masih terdapat layanan pendidikan yang tidak memiliki Prosedur Operasional Standar (POS). Akibatnya tidak ada kejelasan mengenai waktu, biaya maupun syarat-syarat pemberian layanan pendidikan. Sebagai contoh, saat ini belum ada infrastruktur yang memberi kesempatan luas bagi publik untuk mengakses hasil penelitian dan pengabdian masyarakat padahal hasil penelitian ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

**e. Belum Efektifnya Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur**

SDM Kemendikbud secara kuantitas berlebih namun secara kualitas kurang memadai, masih terdapat kesenjangan antara kualifikasi dan kompetensi dengan kebutuhan organisasi, belum akuratnya penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya, serta belum efektifnya sistem pengelolaan kepegawaian berdasarkan kinerja. Permasalahan lainnya terkait dengan data/informasi kepegawaian, yakni rendahnya tingkat keakuratan, kemutakhiran, keterpaduan, dan pemanfaatannya secara terpadu.

**f. Akuntabilitas Kinerja Belum Maksimal**

Sampai dengan saat ini kualitas laporan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih relatif rendah mengingat bahwa laporan tersebut belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Hal ini disebabkan oleh ukuran kinerja organisasi yang belum jelas, dan Indikator Kinerja Utama masih belum tersusun secara jelas dan spesifik.

**g. Kualitas Layanan Publik di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Belum Maksimal.** Layanan tersebut antara lain terdiri atas : 1) Layanan Satuan Pendidikan; 2) Layanan pada Pelaku Pendidikan (Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan) dan Kebudayaan; 3) Layanan Substansi Pendidikan; 4) Layanan Kebudayaan; 5) Layanan Kebahasaan.

**1) Layanan Satuan Pendidikan**

Layanan satuan pendidikan saat ini belum cepat, transparan, responsif, informatif, *accessible*, koordinatif, yang ditandai dengan: masih panjang dan kurang terbukanya proses perijinan sekolah di daerah mulai dari pengajuan hingga persetujuan; masih panjang dan kurang terbukanya proses perijinan pembukaan; masih panjang dan kurang terbukanya proses penyaluran dana bantuan/ hibah (*block grant*); belum tersedianya Standar Pelayanan Minimum pendidikan untuk tiap kabupaten/ kota sebagai bentuk dari pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan; belum tersedianya peta kebutuhan daya tampung tiap jenjang pendidikan dan kondisi sekolah yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dan pemenuhannya terhadap standar, baik minimum, nasional maupun internasional, yang akan menyulitkan implementasi strategi terkait sarana dan prasarana serta pendanaan.

2) Layanan pada Pelaku Pendidikan (Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan) dan kebudayaan

**a) Peningkatan Layanan pada Peserta Didik/siswa**

Kualitas layanan peserta didik saat ini masih belum memadai yang ditandai dengan kurang akuratnya data/informasi peserta didik; pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar masih 95,4% untuk Sekolah Dasar (SD) dan 73,3% untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP); masih tingginya angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SD yaitu 1,7% dan SMP yaitu 1,99%; masih rendahnya keakurasian dan kemutakhiran data peserta didik; serta belum tepatnya pemberian bantuan operasional sekolah dan beasiswa.

**b) Peningkatan Layanan pada PTK/Guru dan Tendik**

Distribusi pendidik dan tenaga Kependidikan masih belum ideal (1:20 untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, serta 1:14 untuk Sekolah Menengah); kualifikasi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan belum seluruhnya terpenuhi, belum melembaganya pemberian penghargaan dan perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, belum terpenuhinya kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, dan belum tersedianya sistem informasi dan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai.

**3) Layanan Substansi Pendidikan**

Pendidikan saat ini belum membentuk kepribadian peserta didik secara utuh dalam pembekalan ilmu pengetahuan, sikap dan perilaku, yang ditandai dengan: masih kurangnya keselarasan luaran pendidikan dan kebutuhan dunia kerja terutama dari sisi kompetensi, jumlah dan sebaran; kurang diperhatikannya kebutuhan tenaga kerja dan potensi daerah, nasional dan internasional dalam perencanaan pembangunan pendidikan.

**4) Layanan Kebudayaan**

Pangkalan data tentang cagar budaya dan warisan budaya tak benda masih belum termutakhirkan. Belum maksimalnya pemanfaatan fungsi museum dan taman budaya. Proses penyensoran film yang masih belum efektif dan efisien. Pengenalan budaya Indonesia di komunitas internasional yang masih belum maksimal. Pelayanan kebudayaan di bidang pendidikan yang belum terintegrasi. Lembaga kepercayaan dan komunitas adat yang masih belum diberdayakan secara maksimal.

Selain permasalahan tersebut di atas, dalam mencapai tujuan dan sasarannya Sekretariat Jenderal pada tahun 2015 - 2019 menghadapi tantangan antara lain:

- 1) Optimalisasi tata kelola organisasi, khususnya terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang pada tahun 2014 telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sehingga pada tahun yang akan datang harus dapat dipertahankan.
- 2) Peningkatan kinerja instansi, antara lain harus dapat mengoptimalkan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, serta pencapaian sasaran/kinerja seiring dengan telah diterimanya tunjangan kinerja oleh para pegawai.

## BAB II

### VISI, MISI, DAN TUJUAN SEKRETARIAT JENDERAL

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan Visi dan Misi Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

#### A. Visi

**Terwujudnya peningkatan Tata Kelola pendidikan dan kebudayaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan penguatan pelibatan publik berlandaskan gotong royong**

#### B. Misi

- 1. Mewujudkan Tata Kelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang transparan dan akuntabel**
- 2. Meningkatkan kualitas layanan dikbud dengan mengembangkan SDM dan budaya kerja yang unggul serta penerapan TIK**
- 3. Meningkatkan ketersediaan, kecepatan, dan kualitas data, statistik dan informasi dikbud**
- 4. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan berbasis IT di Kawasan Asia Tenggara**
- 5. Mengembangkan Perfilman yang lebih berkualitas dan berkarakter sesuai budaya Indonesia**

#### C. Tujuan Sekretariat Jenderal

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan strategis Sekretariat Jenderal tahun 2015—2019 adalah sebagai berikut:

KODE	TUJUAN STRATEGIS
T1	Penguatan koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Kemendikbud
T2	Peningkatan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, layanan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kemendikbud
T3	Peningkatan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana
T4	Penguatan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum

KODE	TUJUAN STRATEGIS
T5	Penguatan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa
T6	Penguatan penerapan <i>e-government</i> untuk mendukung bisnis proses layanan pendidikan dan kebudayaan yang efisien, efektif, akuntabel;
T7	Penguatan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri;

Penjelasan dari masing-masing tujuan strategis yang akan dicapai dalam periode 2015—2019 adalah sebagai berikut:

- Tujuan Strategis 1:** Penguatan koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Kemendikbud bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil koordinasi, sinkronisasi, penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tujuan Strategis 2:** Peningkatan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, layanan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kemendikbud.
- Tujuan Strategis 3:** Peningkatan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana bertujuan untuk membentuk dan menyusun tugas, fungsi, dan susunan organisasi yang mencerminkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bersih, dan bebas KKN serta meningkatkan kualitas layanan agar lebih efisien dan lebih cepat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sehingga lebih responsif, informatif, *acesible*, koordinatif, terbuka dan akuntabel, serta lebih sederhana dan murah.
- Tujuan Strategis 4:** Penguatan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum, bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pengkajian peraturan perundang-undangan, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan serta Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Tujuan Strategis 5:** Penguatan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa bertujuan untuk Inventarisasi, pembinaan pelaksanaan inventarisasi, pelaksanaan verifikasi inventarisasi serta pelaporan barang milik negara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu bertujuan meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- Tujuan Strategis 6:** Penguatan penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses layanan pendidikan dan kebudayaan yang efisien, efektif, dan akuntabel melalui strategi, antara lain: a) penguatan kebijakan *e-government*; b) penguatan sistem dan infrastruktur *e-government* yang terintegrasi; c) peningkatan kapasitas

kelembagaan dan kompetensi SDM; d) penetapan *quick wins* penerapan *e-government*; serta e) pengendalian pengembangan sistem dan pengadaan infrastruktur *e-government* oleh Kemendikbud.

7. **Tujuan Strategis 7:** Penguatan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri mencakup: pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan dan kebudayaan, penguatan pengelolaan dan pendayagunaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan, pendidikan dan pelatihan pegawai, pengembangan perfilman, serta tersedianya analisis dan sinkronisasi kebijakan Kemendikbud.

#### D. Sasaran Strategis Sekretariat Jenderal

Untuk mewujudkan tujuan strategis dalam peningkatan Tata Kelola pendidikan dan kebudayaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta penguatan pelibatan publik, dapat dicirikan dengan tercapainya indikator-indikator kinerja sasaran strategis seperti pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis**

KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
S.S.1	Terselenggaranya Perencanaan dan kerjasama luar negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya Perencanaan Jangka Menengah dan Tahunan berbasis Kinerja</li> <li>• Terselenggaranya Kerjasama Bilateral dan Multilateral Pendidikan dan Kebudayaan</li> </ul>
S.S.2	Dipertahankannya opini Laporan Keuangan Kemendikbud Wajar Tanpa Pengecualian	Laporan Keuangan Kemendikbud mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian
S.S.3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kemendikbud	Skor LAKIP kementerian "A"
S.S.4	Terselenggaranya sistem pengelolaan dan pembinaan aparatur sipil negara	Terwujudnya sistem pengelolaan dan pembinaan aparatur sipil negara
S.S.5	Terselenggaranya pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi dan layanan bantuan hukum, dan tertatanya organisasi, dan tatalaksana yang efektif di lingkungan Kementerian	Terwujudnya pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi dan layanan bantuan hukum, dan tertatanya organisasi, dan tatalaksana yang efektif di lingkungan Kementerian
S.S.6	Terselenggaranya pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan dan kebudayaan, serta pendidikan terbuka jarak jauh	Terwujudnya pengembangan dan pendayagunaan teknologi dan informasi dan komunikasi untuk pendidikan, dan pendidikan terbuka jarak jauh

<b>KODE</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS</b>
S.S.7	Terselenggaranya layanan pendidikan ASEAN	Terwujudnya layanan pendidikan ASEAN
S.S.8	Terselenggaranya pengelolaan dan pendayagunaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan	Terwujudnya pengelolaan dan pendayagunaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan
S.S.9	Terselenggaranya komunikasi dan informasi, serta layanan masyarakat;	Terwujudnya komunikasi dan informasi, serta layanan masyarakat
S.S.10	Terwujudnya kualitas penyensoran film dan iklan film;	Penyensoran film dan iklan film yang berkualitas
S.S.11	Terselenggaranya pengembangan perfilman yang berkualitas dan berkarakter sesuai budaya Indonesia	Terwujudnya pengembangan perfilman yang berkualitas dan berkarakter sesuai budaya Indonesia
S.S.12	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pegawai	Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang kompeten
S.S.13	Terselenggaranya tata kelola Setjen dan Pengelolaan BMN Kementerian	Terwujudnya tata kelola Setjen dan Pengelolaan BMN Kementerian

## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015—2019 dirumuskan berdasarkan pada visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, RPJMN 2015—2019 dan hasil evaluasi capaian pembangunan pendidikan dan kebudayaan.

#### **A. Arah Kebijakan dan Strategi Kemendikbud**

Arah kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2015—2019 dirumuskan berdasarkan pada visi, misi, tujuan strategis Kemendikbud yang mengacu pada RPJMN 2015—2019 dan evaluasi capaian pembangunan pendidikan dan kebudayaan sampai dengan tahun 2014.

Arah kebijakan dan strategi ini juga memperhatikan komitmen pemerintah terhadap pengembangan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*-HDI), Agenda diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*-AEC) pada tahun 2015, konvensi internasional mengenai pendidikan, khususnya Konvensi Dakar tentang Pendidikan untuk Semua (*Education for All*) termasuk agenda EFA setelah tahun 2015, Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*), *UN Post 2015 Development Agenda*, dan *World Summit on Sustainable Development*, serta Konvensi Perlindungan Warisan Dunia (*Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*), Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*-CSICH) dan konvensi pelindungan dan promosi keragaman dan ekspresi budaya (*Convention on the Protection and promotion of the diversity and cultural expression*), Pertemuan Kebudayaan Seluruh Dunia (*World Cultural Forum*) di Bali, juga hasil-hasil pertemuan dan kesepakatan *World Heritage Convention* (WHC) lainnya, untuk melestarikan alam, budaya, situs sejarah dunia untuk kepentingan masyarakat, *ASEM Language Diversity Forum* (2012), dan Kongres Bahasa Indonesia XIII (2013).

Arah Kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2015—2019 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pendidikan dan kebudayaan di pusat dan di daerah terkait dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran strategis yang menggambarkan tujuan strategis. Telaahan terhadap sasaran strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya akan terlihat adanya sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam mewujudkan pendidikan dan kebudayaan yang bermutu dan berdaya saing. Kebutuhan tersebut antara lain mencakup pendidik dan tenaga kependidikan, pembelajaran dan penilaian, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola.

Arah kebijakan Kemendikbud merupakan penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Kemendikbud, berisi satu atau beberapa upaya untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur, dalam bentuk kerangka regulasi, kerangka pelayanan umum dan investasi pemerintah. Selanjutnya arah kebijakan Kemendikbud dituangkan kedalam strategi yang merupakan langkah-langkah berisi program-program indikator untuk mewujudkan visi dan misi Kemendikbud 2015—2019.

Sebagaimana dijelaskan dalam Renstra Kemendikbud 2015--2019, bahwa tingkat keberhasilan tujuan strategis Kemendikbud diukur dengan sasaran strategis Kemendikbud dan sejalan dengan arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015—2019 yang terkait dengan tugas dan fungsi Kemendikbud. Lebih lanjut, arah kebijakan Kemendikbud harus sejalan pula dengan sasaran, arah kebijakan dan strategi agenda pembangunan sub bidang pendidikan dalam RPJMN 2015—2019.

Arah kebijakan Kemendikbud disusun untuk mendorong tercapainya sasaran strategis Kemendikbud tersebut. Oleh karenanya, arah kebijakan Kemendikbud disusun dengan mendasarkan pada sasaran strategis dengan memperhatikan arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015—2019. Arah kebijakan ini selanjutnya dituangkan dalam strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Kemendikbud.

Kebijakan Kemendikbud yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, yang memiliki peran sangat penting untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan keberhasilan pembangunan nasional di berbagai bidang. Upaya yang dilakukan dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya sesuai tugas dan fungsi Kemendikbud terdiri atas tiga subagenda, yaitu: 1) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja Kemendikbud; 2) menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) di Kemendikbud; dan 3) meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik. Selanjutnya arah kebijakan dan strategi ketiga subagenda tersebut di atas masing-masing diuraikan sebagai berikut.

#### **1. Subagenda 1: Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud**

Sasaran dan arah kebijakan dalam membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan yaitu sebagai berikut.

##### **a. Sasaran**

Sasaran yang ingin diwujudkan ialah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditandai dengan, (a) terwujudnya sistem pelaporan dan

kinerja instansi pemerintah; (b) meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; (c) makin efektifnya penerapan *e-government* untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern; dan (d) meningkatnya implementasi *open government* pada seluruh instansi pemerintah.

**b. Arah Kebijakan dan Strategi**

Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang transparan dan akuntabilitas kinerja pemerintahan (Kemendikbud) yaitu sebagai berikut.

- 1) penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi: (i) penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; (ii) penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan (iii) pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah;
- 2) penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi: (i) penguatan kebijakan *e-government* yang mengatur kelembagaan *e-government*; (ii) penguatan sistem dan infrastruktur *e-government* yang terintegrasi; (iii) penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan (iv) penguatan sistem kearsipan berbasis TIK;
- 3) penerapan *open government* merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: (i) pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; (ii) peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; (iii) publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam laman (*website*) masing-masing K/L/D; (iv) penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; (v) pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; (vi) penerbitan *Standard Operating Procedure* (SOP) layanan publik; (vii) pengelolaan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional; dan (viii) penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

## **2. Subagenda 2: Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)**

Sasaran dan arah kebijakan dalam menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

### **a. Sasaran**

Sasaran yang ingin diwujudkan ialah meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang, yang ditandai dengan: (a) terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien; (b) meningkatnya kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi; (c) terimplementasikannya UU Aparatur Sipil Negara (ASN) secara konsisten pada seluruh instansi pemerintah; dan (d) meningkatnya kualitas pelayanan publik.

### **b. Arah Kebijakan dan Strategi**

Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang adalah sebagai berikut:

- 1) restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi (i) penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (kementerian, LPNK dan LNS); (ii) penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan (iii) penguatan sinergis antarlembaga, baik di pusat maupun di daerah;
- 2) penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain, (i) penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; (ii) penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; (iii) perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan (iv) penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN;
- 3) penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain, (i) penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; (ii) penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); (iii) penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); (iv) penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan (v) penguatan sistem informasi kepegawaian nasional;

- 4) peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain, (i) memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; (ii) mendorong inovasi pelayanan publik; (iii) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan (iv) penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

### **3. Subagenda 3: Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik Kemendikbud**

Sasaran dan arah kebijakan dalam menyempurnakan dan meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik terkait tugas dan fungsi Kemendikbud yaitu sebagai berikut:

#### **a. Sasaran**

Sasaran yang akan dicapai yaitu, (a) meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik tentang pembangunan pendidikan dan kebudayaan; (b) meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan; dan (c) meningkatnya implementasi *open government* di Kemendikbud.

#### **b. Arah Kebijakan dan Strategi**

Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran dalam meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik yaitu sebagai berikut.

- 1) membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang akan ditempuh dengan strategi yaitu (i) pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik; (ii) fasilitasi untuk mendorong satuan kerja Kemendikbud wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan; (iii) fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas; (iv) fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan keputusan terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan; (v) penyediaan konten informasi publik berkualitas terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik; (vi) penguatan media centre, media komunitas, media publik lainnya, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), dan M-Pustaka sebagai

media penyebaran informasi publik yang efektif; (vii) kampanye publik terkait dengan pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam rangka pembangunan revolusi mental; (viii) penguatan manusia bidang komunikasi dan informasi; dan (ix) penguatan *Government Public Relation* (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat.

- 2) mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi yaitu (i) penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan; khususnya terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan; (ii) penguatan literasi media terkait dengan pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya; (iii) diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional pendidikan dan kebudayaan melalui berbagai media.

## **B. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal**

Arah Kebijakan Sekretariat Jenderal Tahun 2015—2019 disusun sebagai implementasi dari strategi program yang ditetapkan untuk mendukung tujuan peningkatan Tata Kelola pendidikan dan kebudayaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta penguatan pelibatan publik. Program yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015—2019. Sekretariat Jenderal sebagai koordinator pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kemendikbud memiliki program dengan nomenklatur Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendikbud.

Arah Kebijakan dan strategi yang akan ditempuh Sekretariat Jenderal untuk mencapai peningkatan Tata Kelola pendidikan dan kebudayaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta penguatan pelibatan publik, penjelasannya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri melalui penguatan koordinasi, sinkronisasi, penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pembinaan dan penyelenggaraan kerja sama luar negeri. Adapun strategi yang digunakan untuk mendorong tercapainya tujuan strategis adalah sebagai berikut:
  - a. Penguatan koordinasi, sinkronisasi, dalam perumusan kebijakan, penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Sinkronisasi program pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah;
  - c. Peningkatan pembinaan, koordinasi dan penyelenggaraan kerja sama luar negeri di bidang pendidikan dan kebudayaan;

- d. Peningkatan fasilitasi UNESCO, atase pendidikan dan kebudayaan, dan pembinaan sekolah Indonesia di luar negeri;
  - e. Peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta kerja sama luar negeri.
2. Meningkatkan kualitas perbendaharaan, pembiayaan, akuntansi, pelaporan keuangan, inventarisasi dan pelaporan barang milik negara, serta pembinaan akuntabilitas kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun strategi yang digunakan untuk mendorong tercapainya tujuan strategis adalah sebagai berikut:
    - a. Peningkatan pembinaan perbendaharaan, anggaran, akuntansi, inventarisasi dan pelaporan barang milik dan penyusunan laporan keuangan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
    - b. Peningkatan pembinaan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
    - c. Peningkatan kualitas laporan dan pembinaan akuntabilitas kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  3. Peningkatan pengelolaan dan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun strategi yang digunakan untuk mendorong tercapainya tujuan strategis adalah sebagai berikut:
    - a. Peningkatan kualitas rencana kebutuhan pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan koordinasi pengendalian formasi guru;
    - b. Peningkatan kualitas pemetaan kompetensi, pengadaan, pembinaan dan disiplin, pengembangan pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
    - c. Peningkatan kualitas pelaksanaan promosi, mutasi, administrasi, dan fungsional di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
    - d. Peningkatan kualitas pelaksanaan pemberhentian dan pemensiunan pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
    - e. Peningkatan kualitas pemberian penghargaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
    - f. Pengembangan sistem informasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
    - g. Pengembangan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
    - h. Peningkatan kualitas tata naskah dan layanan informasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

4. Peningkatan pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, organisasi, dan ketatalaksanaan serta pemberian advokasi dan bantuan hukum di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun strategi yang digunakan untuk mendorong tercapainya tujuan strategis adalah sebagai berikut:
  - a. Peningkatan pembinaan dan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan;
  - b. Peningkatan kualitas penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan;
  - c. Peningkatan kualitas penelaahan kasus dan masalah hukum serta pemberian advokasi dan bantuan hukum kepada satuan organisasi dan pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - d. Peningkatan kualitas pengkajian dan pengembangan kelembagaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - e. Peningkatan kualitas evaluasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - f. Peningkatan kualitas pengkajian, pembinaan, dan pengembangan ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - g. Peningkatan kualitas pengkajian, pembinaan, dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - h. Peningkatan analisis jabatan dan penyajian informasi jabatan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - i. Peningkatan kualitas fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi dan bantuan hukum, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan analisis jabatan di daerah.
5. Peningkatan kualitas koordinasi dan pengelolaan informasi, publikasi, hubungan antarlembaga, dan layanan masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan. Adapun strategi yang digunakan untuk mendorong tercapainya tujuan strategis adalah sebagai berikut:
  - a. Peningkatan koordinasi dan pengelolaan informasi, publikasi, dan hubungan antarlembaga;
  - b. Peningkatan kualitas pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang pendidikan dan kebudayaan;
  - c. Peningkatan kualitas publikasi di bidang pendidikan dan kebudayaan;
  - d. Peningkatan kualitas hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, dan media;
  - e. Peningkatan kualitas pengelolaan perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - f. Peningkatan kualitas pemberian layanan informasi di bidang pendidikan dan kebudayaan;

- g. Peningkatan kualitas koordinasi dan pelaksanaan layanan masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan;
  - h. Peningkatan kualitas evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan informasi, publikasi, hubungan antarlembaga, dan layanan masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan.
6. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan gaji, urusan ketatausahaan, pembinaan dan pengelolaan persuratan dan kearsipan, barang milik negara, serta kerumahtanggaan dan keprotokolan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun strategi yang digunakan untuk mendorong tercapainya tujuan strategis adalah sebagai berikut:
- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan gaji;
  - b. Peningkatan kualitas urusan persuratan dan kearsipan di lingkungan Sekretariat Jenderal;
  - c. Peningkatan kualitas urusan tata usaha pimpinan dan keprotokolan;
  - d. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengelolaan barang milik negara, persuratan, dan kearsipan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - e. Peningkatan kualitas penatausahaan barang milik negara Biro.
7. Peningkatan kualitas hasil analisis dan sinkronisasi kebijakan, pengelolaan isu dan masalah strategis Kementerian serta pemantauan dan evaluasi target rencana kerja Kementerian. Adapun strategi yang digunakan untuk mendorong tercapainya tujuan strategis adalah sebagai berikut:
- a. Peningkatan kualitas pelaksanaan analisis dan sinkronisasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Penguatan pengelolaan isu dan masalah strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - c. Penguatan pemantauan dan evaluasi target rencana kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan dan kebudayaan. Adapun strategi yang digunakan untuk mendorong tercapainya tujuan strategis adalah sebagai berikut:
- a. Peningkatan kualitas kebijakan teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi pendidikan dan kebudayaan;
  - b. Pengembangan teknologi pembelajaran untuk pendidikan dan kebudayaan berbasis radio, televisi, film, multimedia, dan web;
  - c. Pengembangan dan pengelolaan jejaring teknologi informasi dan komunikasi pendidikan dan kebudayaan;
  - d. Peningkatan pengelolaan dan pengintegrasian e-layanan pendidikan dan kebudayaan;

- e. Peningkatan fasilitasi pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan dan kebudayaan;
  - f. Penguatan pemantauan dan evaluasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi pendidikan dan kebudayaan;
  - g. Peningkatan kerja sama di bidang pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan dan kebudayaan;
  - h. Peningkatan kualitas laporan pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan dan kebudayaan;
  - i. Peningkatan pembinaan jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran; dan pelaksanaan administrasi Pusat.
9. Peningkatan kualitas pengelolaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan. Adapun strategi yang digunakan untuk mendorong tercapainya tujuan strategis adalah sebagai berikut:
- a. Peningkatan kualitas kebijakan teknis pengelolaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan;
  - b. Peningkatan kualitas pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data pendidikan dan kebudayaan;
  - c. Peningkatan pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan;
  - d. Penguatan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan.
10. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan pegawai. Adapun strategi yang digunakan untuk mendorong tercapainya tujuan strategis adalah sebagai berikut:
- a. Peningkatan kualitas kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan pegawai;
  - b. Peningkatan kualitas pengembangan program pendidikan dan pelatihan pegawai;
  - c. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan pegawai;
  - d. Peningkatan kualitas pengembangan sistem informasi pendidikan dan pelatihan;
  - e. Peningkatan kualitas fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
  - f. Peningkatan kualitas kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan;
  - g. Penguatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pasca pendidikan dan pelatihan.
11. Peningkatan kualitas Pengembangan Perfilman. Adapun strategi yang digunakan untuk mendorong tercapainya tujuan strategis adalah sebagai berikut:
- a. Peningkatan kualitas kebijakan teknis di bidang pengembangan perfilman;
  - b. Peningkatan kualitas pemberian izin dan pengendalian kegiatan dan usaha perfilman;
  - c. Fasilitasi pengembangan film dan apresiasi serta pemberian penghargaan di bidang perfilman;
  - d. Peningkatan pelaksanaan pengarsipan film;
  - e. Peningkatan pembinaan tenaga teknis di bidang perfilman.

12. Mempertahankan Opini Audit BPK RI atas laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun strategi yang digunakan untuk mendorong tercapainya tujuan strategis adalah sebagai berikut:

- a. Penyempurnaan sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dengan memanfaatkan TIK;
- b. Penguatan Sistem Pengendalian Internal sebagai pengawasan melekat pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pencegahan dini terhadap kemungkinan kesalahan prosedur.

13. Mempertahankan dan meningkatkan Skor Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sekurang-kurangnya 80

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan dan RB Nomor 29 Tahun 2010, mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan dan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana strategis, rencana kinerja dan pengukuran kinerja. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. SAKIP terdiri atas berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja. Adapun strategi yang digunakan untuk mendorong tercapainya tujuan strategis adalah sebagai berikut:

- a. Penerbitan payung hukum implementasi SAKIP di lingkungan Kemendikbud,
- b. Penerbitan Dokumen Penetapan Kinerja yang merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja/kontrak kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki.
- c. Pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja secara berkala.

**14. Realisasi penyerapan anggaran sekurang-kurangnya 95% setiap tahunnya**

Realisasi anggaran yang tepat waktu setiap tahunnya dan sesuai dengan rencana yang telah disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta mencapai 95% pada akhir tahun anggaran menunjukkan akuntabilitas perencanaan.

Adapun strategi yang digunakan untuk mendorong tercapainya tujuan strategis adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas penyusunan anggaran berbasis kinerja (berorientasi output dan outcome);
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Pengukuran keberhasilan dari strategi tersebut di atas, dapat dinilai dari ketercapaian Sasaran Program yang dicapai dengan tingkat ketercapaian Indikator Kinerja Program (IKP) seperti yang disajikan pada Tabel 3.1

**Tabel 3.1**  
**Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program (IKP)**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Base Line 2014	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2015	2016	2017	2018	2019	
<b>01 - PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA</b>								<b>SETJEN</b>
<b>SP.1.1</b>	<b>Terselenggaranya sistem perencanaan yang andal</b>							
IKP.1.1.1	Persentase sasaran Renstra dan RKA tahunan yang dipenuhi oleh satuan kerja Kemendikbud	80,00	84,00	88,00	92,00	96,00	100,00	
IKP.1.1.2	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud di luar negeri terhadap layanan Atdik/DEWATAP UNESCO dan SLN	89,00	92,00	94,00	96,00	98,00	100,00	
IKP.1.1.3	Persentase tindak lanjut kerja sama Bilateral, Regional, dan Multilateral Bidang Dikbud	72,00	78,00	81,00	84,00	87,00	90,00	
<b>SP.1.2</b>	<b>Meningkatnya pemanfaatan sistem pembinaan dan pengelolaan keuangan yang akuntabel</b>							
IKP.1.2.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kemendikbud	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
<b>SP.1.3</b>	<b>Meningkatnya pemanfaatan sistem pengelolaan dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN)</b>							
IKP.1.3.1	Persentase Pegawai yang melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan kompetensi	30,00	47,00	56,00	66,00	77,00	85,00	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Base Line 2014	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2015	2016	2017	2018	2019	
<b>SP.1.4</b>	<b>Terseleenggaranya pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, layanan bantuan hukum, dan tertatanya organisasi dan tatalaksana yang efektif</b>							
IKP.1.4.1	Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang dibutuhkan	162	150	160	170	180	190	
IKP.1.4.2	Jumlah masalah hukum (litigasi dan nonlitigasi) yang diselesaikan	46	50	60	70	80	85	
IKP.1.4.3	Jumlah unit organisasi yang melakukan penataan organisasi	140	140	140	140	140	140	
IKP.1.4.4	Jumlah unit organisasi yang menerapkan tata laksana yang efektif	140	140	140	140	140	140	
IKP.1.4.5	Jumlah Jabatan di lingkungan Kemendikbud yang telah di analisis dan diukur beban kerjanya	425	425	425	425	425	425	
<b>SP.1.5</b>	<b>Meningkatnya pendayagunaan teknologi dan informasi, serta komunikasi untuk pendidikan</b>							
IKP.1.5.1	Persentase pengembangan, pembinaan, dan Pendayagunaan TIK untuk pendidikan	47,60	52,11	56,62	61,39	66,68	70,61	
IKP.1.5.2	Jumlah Bahan Belajar/Media Pembelajaran berbasis TIK	9.000	10.200	11.400	12.600	13.800	15.000	
IKP.1.5.3	Jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan e-pembelajaran	55.063	65.811	76.558	87.305	98.053	108.800	
IKP.1.5.4	Presentase E-Layanan Kementerian yang sesuai dengan tata kelola TIK	20,00	40,00	60,00	80,00	100,	100	
<b>SP.1.6</b>	<b>Meningkatnya akses layanan pendidikan antarnegara ASEAN</b>							
IKP.1.6.1	Persentase fasilitasi pembelajaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan SEAMEO	60,00	67,10	74,20	81,30	88,4	95,50	
IKP.1.6.2	Persentase peningkatan akses layanan pendidikan antarnegara ASEAN	50,00	58,30	66,60	74,90	83,2	91,50	
<b>SP.1.7</b>	<b>Meningkatnya pemanfaatan data pokok dan statistik pendidikan dan kebudayaan</b>							
IKP.1.7.1	Persentase tingkat validasi data bidang pendidikan dan kebudayaan	75,00	80,00	85,00	90,00	95,0	100,00	
IKP.1.7.2	Persentase penyebaran hasil pendayagunaan data dan statistik	70,00	75,00	80,00	85,00	90,0	95,00	
IKP.1.7.3	Persentase terintegrasinya pendataan pusat dan daerah	15,00	20,00	40,00	60,00	80,0	100,00	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Base Line 2014	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2015	2016	2017	2018	2019	
<b>SP.1.8</b>	<b>Meningkatnya kualitas layanan Komunikasi dan layanan masyarakat</b>							
IKP.1.8.1	Indeks kepuasan pemangku kepentingan kemendikbud	72	73	74	75	76	77	
IKP.1.8.2	Persentase pengaduan masyarakat yang direspon secara cepat dan efektif	25,00	50,00	65,0%	80,00	90,0	100,00	
<b>SP.1.9</b>	<b>Meningkatnya kualitas pengembangan perfilman, penyensoran film dan iklan film Indonesia</b>							
IKP.1.9.1	Persentase film dan iklan film yang lulus sensor	83,00	83,00	86,00	89,00	92,0	95,00	
IKP.1.9.2	Persentase meningkatnya kualitas film dan iklan sesuai dengan nilai luhur budaya Indonesia	45,00%	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	
IKP.1.9.3	Presentase perizinan dan peredaran film						70,00	
IKP.1.9.4	Presentase meningkatnya apresiasi dan tenaga perfilman						70,00	
<b>SP.1.10</b>	<b>Meningkatnya kualitas Pengembangan Perfilman</b>							
IKP.1.10.1	Presentase kualitas pemberian izin dan pengendalian kegiatan dan usaha perfilman	-	46	52	58	64	70	
IKP.1.10.2	Presentase pengembangan film dan apresiasi serta pemberian penghargaan di bidang perfilman	-	50	55	60	65	70	
<b>SP.1.11</b>	<b>Terselenggaranya tata kelola Setjen dan pengelolaan BMN Kementerian yang akuntabel</b>							
IKP.1.11.1	Indeks kepuasan layanan setjen	60,00	87,00	89,00	91,00	93,00	95,00	
IKP.1.11.2	Persentase aset Kemendikbud yang telah ditetapkan status penggunaannya dan telah tersertifikasi	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,00	
<b>SP.1.12</b>	<b>Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pegawai</b>							
IKP.1.12.1	Jumlah aparaturnya Kemendikbud yang mengikuti diklat jabatan, teknis, dan fungsional	20,00	30,00	41,00	50,00	60,00	100,00	
IKP1.12.2	Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan pengembangan tenaga kependidikan untuk seluruh jenjang pendidikan	100,00	100,0	100,0	100,0	100,	100,00	
<b>SP1.13</b>	<b>Terselenggaranya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan</b>							
IKP1.13.1	Jumlah dokumen analisis dan sinkronisasi kebijakan	100,00	100,0	100,0	100,0	100,	100,00	

Indikator Kinerja Program dapat dicapai dan diukur melalui ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

**1. Peningkatkan layanan prima dalam menunjang fungsi pelayanan umum Kementerian, dapat dicapai dengan Sasaran Kegiatan:**

- a. Terlaksananya perencanaan, penganggaran, pemantauan, analisis dan evaluasi program dan anggaran Sekretariat Jenderal.
- b. Terwujudnya pengelolaan dan pembinaan BMN dan persuratan kementerian, tatausaha pimpinan, keprotokolan, serta kearsipan Setjen.
- c. Terimplementasikannya *e-office* Kementerian
- d. Tercapainya tunjangan kinerja 100%
- e. Terselenggaranya urusan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan dan kepegawaian Setjen.

Keberhasilan dari sasaran kegiatan ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja kegiatan seperti yang disajikan pada Tabel 3.2

**Tabel 3.2**

**Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Program Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian**

KODE IKK	IKK	SATUAN	KONDISI AWAL (2014)	TARGET				
				2015	2016	2017	2018	2019
IKK 3.2.1	Meningkatnya efektivitas perencanaan, penganggaran, pemantauan, analisis dan evaluasi program dan anggaran Sekretariat Jenderal	Persen	100	100	100	100	100	100
IKK 3.2.2	Terlaksananya pengelolaan dan pembinaan BMN dan persuratan kementerian, tatausaha pimpinan, keprotokolan, serta kearsipan Setjen.	Persen	100	100	100	100	100	100
IKK 3.2.3	Diterapkannya <i>e-office</i> Kementerian	Persen	100	100	100	100	100	100
IKK 3.2.4	Diterapkannya tunjangan kinerja 100%	Persen	50	50	70	80	90	100
IKK 3.2.5	Terlaksananya urusan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan dan kepegawaian Setjen	Persen	100	100	100	100	100	100

2. Peningkatan Layanan Prima Dalam Pengelolaan BMN dan Sarana Prasarana Kementerian, dapat dicapai dengan Sasaran Kegiatan sebagai berikut:
- Tersedianya tenaga pengelola BMN yang kompeten
  - Tertibnya Pengelolaan BMN
  - Terjaminnya keberfungsian Sarana dan Prasarana Kantor.

Keberhasilan dari sasaran kegiatan ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja kegiatan seperti yang disajikan pada Tabel 3.3

**Tabel 3.3**

**Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Program Peningkatan Layanan Prima Dalam Pengelolaan BMN dan Sarana Prasarana Kementerian**

KODE IKK	IKK	SATUAN	KONDISI AWAL (2014)	TARGET				
				2015	2016	2017	2018	2019
IKK 3.3.1	Meningkatnya kompetensi tenaga pengelola BMN	Persen	40	40	60	70	80	100
IKK 3.3.2	Meningkatnya Ketertiban Pengelolaan BMN	Persen	100	100	100	100	100	100
IKK 3.3.3	Meningkatnya keberfungsian Sarana dan Prasarana Kantor	Persen	100	100	100	100	100	100

3. Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Kerja Sama Luar Negeri, dapat dicapai dengan Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

- Tersedianya kebijakan jangka menengah (Renstra) dan Tahunan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud;
- Tersedianya dokumen perencanaan program, kegiatan, dan anggaran tahunan Kemendikbud yang telah diteliti dan disahkan;
- Jumlah Satker merealisasikan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Kementerian sesuai target yang ditetapkan;
- Jumlah penyelenggaraan dan layanan kerja sama Luar Negeri dan Organisasi Internasional di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- Jumlah layanan Atdikbud/DEWATAP UNESCO dan SILN;
- Jumlah penerima bea siswa pemerintah RI; dan
- Jumlah layanan tamu asing dan pelaksanaan ketatausahaan Biro.

Keberhasilan dari sasaran kegiatan ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja kegiatan seperti yang disajikan pada Tabel 3.4

**Tabel 3.4**  
**Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Program Peningkatan Pelayanan Prima dalam**  
**Perencanaan, Penganggaran dan Kerja Sama Luar Negeri**

KODE IKK	IKK	SATUAN	KONDISI AWAL (2014)	TARGET				
				2015	2016	2017	2018	2019
IKK 3.4.1	Tersedianya kebijakan jangka menengah (Renstra) dan Tahunan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud	Persen	100	100	100	100	100	100
IKK 3.4.2	Tersedianya dokumen perencanaan program, kegiatan, dan anggaran tahunan Kemendikbud yang telah diteliti dan disahkan	Persen	100	100	100	100	100	100
IKK 3.4.3	Jumlah Satker merealisasikan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Kementerian sesuai target yang ditetapkan	Persen	92,0	93,0	94,0	95,0	96,0	97,0
IKK 3.4.4	Jumlah penyelenggaraan dan layanan kerja sama Luar Negeri dan Organisasi Internasional di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Organ./ lembaga	70,0	71,0	72,0	72,0	73,0	74,0
IKK 3.4.5	Jumlah Layanan Atdikbud/DEWATAP UNESCO dan SILN	Orang	145,0	150,0	158,0	165,0	174,0	182,0
IKK.3.4.6	Jumlah penerima bea siswa pemerintah RI	Orang	6520,0	6579,0	7027,0	7379,0	7730,0	8081,0
IKK.3.4.7	Jumlah layanan tamu asing dan pelaksanaan ketatausahaan Biro	Orang	30,0	32,0	34,0	35,0	37,0	39,0

**4. Peningkatan Pelayanan Prima Bidang Pengelolaan Anggaran dan Akuntabilitas, dapat dicapai dengan Sasaran Kegiatan sebagai berikut:**

- a. Persentase Daya Serap Anggaran Kementerian;
- b. Persentase Satker yang Laporan Keuangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Jumlah Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat bantuan peningkatan kapasitas;

d. Skor kualitas LAKIP Kemendikbud menurut penilaian Menpan.

Keberhasilan dari sasaran kegiatan ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja kegiatan seperti yang disajikan pada Tabel 3.5

**Tabel 3.5**  
**Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Layanan Prima di Bidang**  
**Pengelolaan Anggaran dan Akuntabilitas**

KODE IKK	IKK	SATUAN	KONDISI AWAL (2014)	TARGET				
				2015	2016	2017	2018	2019
IKK 3.5.1	Persentase Daya serap Anggaran Kementerian	Persen	94	94	95	96	97	98
IKK 3.5.2	Persentase Satker yang laporan Keuangannya sesuai dengan peraturan perundangan	Persen	100	100	100	100	100	100
IKK 3.5.3	Skor kualitas LAKIP Kemendikbud menurut penilaian Menpan	Skor	75	80	80	80	80	80

**5. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara**, dapat dicapai dengan Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

Tercapainya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara. Keberhasilan dari sasaran kegiatan ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja Kegiatan seperti yang disajikan pada Tabel 3.6

**Tabel 3.6**  
**Indikator Kinerja Kegiatan pada sasaran Program Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara**

KODE IKK	IKK	SATUAN	KONDISI AWAL (2014)	TARGET				
				2015	2016	2017	2018	2019
IKK 3.6.1	Persentase pegawai baru yang direkrut dengan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan	Persen	45	50	65	70	80	90
IKK 3.6.2	Persentase jabatan yang telah divalidasi	Persen	35	45	60	75	90	100

KODE IKK	IKK	SATUAN	KONDISI AWAL (2014)	TARGET				
				2015	2016	2017	2018	2019
IKK 3.6.3	Persentase standar kompetensi jabatan yang telah ditetapkan	Persen	35	45	60	75	90	100
IKK 3.6.4	Persentase pegawai yang telah melaksanakan asesmen berdasarkan kompetensi	Persen	40	50	60	75	80	90
IKK 3.6.5	Persentase pegawai yang telah melaksanakan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Persen	80	90	100	100	100	100
IKK 3.6.6	Persentase kelengkapan dan keakuratan basis data pegawai	Persen	55	60	75	90	100	100
IKK 3.6.7	Persentase pegawai terlayani oleh sistem mutasi dengan tepat waktu	Persen	55	60	75	90	100	100
IKK 3.6.8	Persentase pegawai dengan kinerja minimal "baik"	Persen	45	50	60	70	80	90
IKK 3.6.9	Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat pegawai berbasis kompetensi	Persen	25	30	40	50	65	80
IKK 3.6.10	Persentase pencapaian target kinerja program Biro Kepegawaian	Persen	86,16	90	95	98	98	98

**6. Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum dan Organisasi**, dapat dicapai dengan Sasaran Kegiatan:

Tercapainya Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum dan Organisasi, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

- a. Jumlah peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan yang dibutuhkan;

- b. Jumlah masalah hukum (litigasi dan non litigasi) yang diselesaikan;
- c. Jumlah unit organisasi yang melakukan penataan organisasi;
- d. Jumlah unit organisasi yang menerapkan tatalaksana yang efektif;
- e. Jumlah Jabatan di lingkungan Kemdikbud yang telah dianalisis dan diukur beban kerjanya.

Keberhasilan dari sasaran kegiatan ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja Kegiatan seperti yang disajikan pada Tabel 3.7

**Tabel 3.7**

**Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Program  
Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum dan Organisasi**

KODE IKK	IKK	SATUAN	KONDISI AWAL (2014)	TARGET				
				2015	2016	2017	2018	2019
IKK 3.7.1	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan	Naskah	145	150	160	170	180	200
IKK 3.7.2	Tingkat kajian dan layanan bantuan hukum dan HAM	Laporan	30	32	35	35	35	37
IKK 3.7.3	Jumlah unit organisasi yang melakukan penataan	Unit Kerja	40	50	55	60	60	65
IKK 3.7.4	Jumlah unit organisasi yang menerapkan tatalaksana dalam rangka peningkatan layanan publik	Unit Kerja	35	40	45	50	55	60
IKK 3.7.5	Jumlah unit kerja yang melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja	Unit Kerja	25	30	35	40	45	50

**7. Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan dan Kebudayaan**, dapat dicapai dengan Sasaran Kegiatan sebagai berikut: Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan. Keberhasilan dari sasaran kegiatan ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja Kegiatan seperti yang disajikan pada Tabel 3.8

Tabel 3.8

**Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Program Pengembangan dan Pendayagunaan  
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan dan Kebudayaan**

KODE IKK	IKK	SATUAN	KONDISI AWAL (2014)	TARGET				
				2015	2016	2017	2018	2019
IKK 3.8.1	Jumlah satuan pendidikan yang terkoneksi jaringan <i>online</i>	satuan pendidikan	23.000	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000
IKK 3.8.2	Jumlah satuan kerja/unit kerja yang terkoneksi jaringan <i>online</i>	Satker	650	650	650	650	650	650
IKK 3.8.3	Jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan e-pembelajaran	satuan pendidikan	65.700	65.811	76.558	87.305	98.053	108.800
IKK 3.8.4	Jumlah satuan pendidikan yang dapat mengakses siaran Radio dan Televisi Pendidikan	satuan pendidikan	26.130	69.305	80.975	93.424	107.169	117.284
IKK 3.8.5	Jumlah Model Media berbasis Audio/Radio, Video/Televisi, dan Multimedia	Model	30	40	50	60	70	80
IKK 3.8.6	Jumlah satuan kerja yang memanfaatkan e-Administrasi	Satker	300	60	90	115	135	150
IKK 3.8.7	Jumlah Bahan Belajar/Media Pembelajaran berbasis TIK	Bahan Belajar	10.000	10.200	11.400	12.600	13.000	15.000
IKK 3.8.8	Jumlah SDM yang terampil dalam mengembangkan dan memanfaatkan TIK untuk pendidikan	Orang	30.000	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000

**8. Pengembangan Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh (PTJJ) Matematika, Bahasa Asing, Biologi, Gizi dan IPA di Asia Tenggara,** dapat dicapai dengan Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

Pengembangan Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh (PTJJ) Di Asia Tenggara. Kerhasilan dari sasaran kegiatan ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja Kegiatan seperti yang disajikan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9

**Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Program Pengembangan Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh (PTJJ) Matematika, Bahasa Asing, Biologi, Gizi dan IPA di Asia Tenggara**

KODE IKK	IKK	SATUAN	KONDISI AWAL (2014)	TARGET				
				2015	2016	2017	2018	2019
IKK 3.9.1	Jumlah Model yang Dikembangkan di Kawasan Asia Tenggara untuk bidang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), Matematika, Sains, Bahasa, Nutrisi & Kesehatan, dan Biologi tropika	Model	35	68	40	43	46	49
IKK 3.9.2	Jumlah Penelitian Pengembangan, dan Evaluasi untuk bidang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), Matematika, Sains, Bahasa, Nutrisi & Kesehatan, dan Biologi tropika	Penelitian	145	149	176	182	188	194
IKK 3.9.3	Jumlah Institusi di Kawasan Asia Tenggara yang Terlayani Melalui Pelatihan untuk bidang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), Matematika, Sains, Bahasa, Nutrisi & Kesehatan, dan Biologi tropika.	Institusi	290	104	314	324	334	344
IKK 3.9.4	PTK yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme untuk bidang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), Matematika, Sains, Bahasa, Nutrisi & Kesehatan, dan Biologi tropika	PTK	4.000	4.317	4.596	5.166	5.736	6.306
IKK 3.9.5	Jumlah publikasi (newsletter, journal, proceeding, annual report, profil center) di bidang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), Matematika, Sains, Bahasa, Nutrisi & Kesehatan, dan Biologi tropika	Publikasi	43.000	70.058	63.862	64.322	64.552	64.432

**9. Penyediaan Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan,** dapat dicapai dengan Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

Penyediaan Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

- Persentase Pembelajaran, Warisan Budaya tak Benda, dan Kelembagaan yang Tervalidasi dalam *Dataware House*;
- Persentase Tersedianya Data Referensi Pendidikan dan Kebudayaan serta Wilayah;
- Persentase Ketenagaan, Peserta Didik, Warisan Benda yang tervalidasi dalam *Dataware House*;
- Jumlah Publikasi Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Nasional;

- e. Jumlah Publikasi Hasil Pendayagunaan Data Pendidikan dan Kebudayaan;
- f. Layanan Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (Skala Kepuasan : 1 – 5);
- g. Tersedianya Sistem Pengelolaan dan Pendayagunaan Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. Persentase SKPD yang Telah Mengimplementasikan Sistem Verval Referensi Pendidikan dan Kebudayaan;
- i. Persentase SKPD Terkoordinasi Dalam Pengelolaan dan Pendayagunaan Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan;
- j. Persentase SKPD yang telah Terintegrasi dengan Backbone Pengelolaan Data Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud;
- k. Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Kepegawaian; Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- l. Persentase Tertib Pencatatan BMN.

Keberhasilan dari sasaran kegiatan ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja Kegiatan seperti yang disajikan pada Tabel 3.10

**Tabel 3.10**  
**Indikator Kinerja Kegiatan pada Program Penyediaan Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan**

KODE IKK	IKK	SATUAN	KONDISI AWAL (2014)	TARGET				
				2015	2016	2017	2018	2019
IKK 3.10.1	Kelembagaan- yang Tervalidasi dalam <i>Dataware House</i>	Persen	65	70	80	85	90	97
IKK 3.10.2	Persentase Tersedianya Data Referensi Pendidikan dan Kebudayaan serta Wilayah	Persen	65	70	80	85	90	97
IKK 3.10.3	Persentase Ketenagaan, Peserta Didik, Warisan Benda yang tervalidasi dalam <i>Dataware House</i>	Persen	35	40	45	60	75	80
IKK 3.10.4	Jumlah Publikasi Statistik Pendidikan dan Kebudayaan	Publikasi	11	12	12	12	12	12
IKK 3.10.5	Jumlah Publikasi Hasil Pendayagunaan Data Pendidikan dan Kebudayaan	Publikasi	23	25	27	29	31	33
IKK 3.10.6	Layanan Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (Skala Kepuasan: 1 – 5)	Nilai	3	3,5	4	4	4,5	4,5
IKK 3.10.7	Tersedianya Sistem Pengelolaan dan Pendayagunaan Data dan Statistik Pendidikan.	Aplikasi	10	10	10	10	10	10

KODE IKK	IKK	SATUAN	KONDISI AWAL (2014)	TARGET				
				2015	2016	2017	2018	2019
IKK 3.10.8	Persentase SKPD Yg Telah Mengimplementasikan Sistem Verval Referensi Pendidikan dan Kebudayaan	Persen	10	20	40	60	80	100
IKK 3.10.9	Persentase SKPD Terkoordinasi Dalam Pengelolaan Dan Pendayagunaan Data Dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan	Persen	10	10	10	10	10	10
IKK 3.10.10	Persentase SKPD Yang Telah Terintegrasi Dengan <i>Backbone</i> Pengelolaan Data Pendidikan dan Kebudayaan	Persen	10	20	40	60	80	100
IKK 3.10.11	Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja Dan Kepegawaian	Dokumen	23	23	23	23	23	23
IKK 3.10.12	Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Dengan Peraturan Perundang – Undangan	Persen	100	100	100	100	100	100
IKK 3.10.13	Persentase Tertib Pencatatan BMN	Persen	100	100	100	100	100	100

**10. Peningkatan Layanan Prima Di Bidang Komunikasi dan Layanan Masyarakat,** dapat dicapai dengan Indikator Kinerja Kegiatan, sebagai berikut:

- a. Persentase Kebijakan/Program Kemendikbud Yang Terpublikasi ke Masyarakat melalui Media;
- b. Persentase Satker Kemendikbud yang Arsip dan Dokumentasinya Terintegrasi dengan pusat Arsip dan Dokumentasi Kementerian;
- c. Terlayannya permintaan informasi dan dokumentasi dari pemangku kepentingan;
- d. Persentase Layanan Kemitraan Kemendikbud dengan Lembaga Negara, Organisasi/Lembaga Masyarakat dan Media; dan
- e. Menurunnya/Berkurangnya jumlah pengaduan dari pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan.

Keberhasilan dari Sasaran Kegiatan ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja Kegiatan seperti yang disajikan pada Tabel 3.11

**Tabel 3.11**  
**Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Program Peningkatan Layanan Prima**  
**Di Bidang Komunikasi dan Layanan Masyarakat**

KODE IKK	IKK	SATUAN	KONDISI AWAL (2014)	TARGET				
				2015	2016	2017	2018	2019
IKK 3.11.1	Persentase Kebijakan/Program Kemendikbud Yang Terpublikasi ke Masyarakat melalui Media	Persen	74	74	78	82	85	87
IKK 3.11.2	Persentase Satker Kemendikbud yang Arsip dan Dokumentasinya Terintegrasi dengan pusat Arsip dan Dokumentasi Kementerian	Persen	50	50	55	60	65	70
IKK 3.11.3	Terlayannya permintaan informasi dan dokumentasi dari pemangku kepentingan	Persen	87	87	88	89	90	91
IKK 3.11.4	Persentase layanan Kemitraan Kemendikbud dengan Lembaga Negara, Organisasi/Lembaga Masyarakat dan Media	Persen	87	99	99	100	100	100
IKK 3.11.5	Menurunnya/berkurangnya jumlah pengaduan dari pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan	Aduan	4.500	4.000	3.500	3.000	2.500	2.000

**11. Peningkatan Kualitas Sensor Film**, dapat dicapai dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

- a. Jumlah Film dan Iklan Film yang disensor;
- b. Persentase Sosialisasi dan Koordinasi Kebijakan Penyensoran; dan
- c. Jumlah Pasilitasi Kelembagaan dan Keanggotaan.

Keberhasilan dari sasaran kegiatan ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja Kegiatan seperti yang disajikan pada Tabel 3.12

**Tabel 3.12**  
**Indikator Kinerja Kegiatan pada Program Penyelesaian Sensor Film dan Iklan Film tepat sasaran dan tepat waktu**

KODE IKK	IKK	SATUAN	KONDISI AWAL (2014)	TARGET				
				2015	2016	2017	2018	2019
IKK 3.13.1	Jumlah Film dan Iklan Film yang disensor	Judul	45.050	46.100	46.200	46.300	46.400	46.500
IKK 3.13.2	Persentase Sosialisasi dan Koordinasi Kebijakan Penyensoran	Persen	83	94	94	95	95	96

KODE IKK	IKK	SATUAN	KONDISI AWAL (2014)	TARGET				
				2015	2016	2017	2018	2019
IKK 3.13.3	Jumlah Fasilitas Kelembagaan dan Keanggotaan	Daerah	10	11	12	13	14	15

**12. Peningkatan kualitas Pengembangan Perfilman,** dapat dicapai dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

- a. Presentase meningkatnya kualitas kebijakan teknis di bidang pengembangan perfilman;
- b. Presentase kualitas pemberian izin dan pengendalian kegiatan dan usaha perfilman;
- c. Presentase pengembangan film dan apresiasi serta pemberian penghargaan di bidang perfilman;
- d. Presentase meningkatnya pelaksanaan pengarsipan film; dan
- e. Pembinaan tenaga teknis di bidang perfilman.

Keberhasilan dari sasaran kegiatan ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja Kegiatan seperti yang disajikan pada Tabel 3.13

**Tabel 3.13**  
**Indikator Kinerja Peningkatan Pengembangan Perfilman**

KODE IKK	IKK	SATUAN	KONDISI AWAL (2014)	TARGET				
				2015	2016	2017	2018	2019
IKK 3.14.1	Presentase meningkatnya kualitas kebijakan teknis di bidang pengembangan perfilman	%	40	45	50	55	60	65
IKK 3.14.2	Presentase kualitas pemberian izin dan pengendalian kegiatan dan usaha perfilman	%	42	46	52	58	64	70
IKK 3.14.3	Presentase pengembangan film dan apresiasi serta pemberian penghargaan di bidang perfilman	%	45	50	55	60	65	70
IKK 3.14.4	Presentase meningkatnya pelaksanaan pengarsipan film	%	43	47	51	55	59	63
IKK 3.14.5	Pembinaan tenaga teknis di bidang perfilman	Peserta	125	140	160	160	200	200

### C. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi dibutuhkan Sekretariat Jenderal untuk mendukung tercapainya Tujuan Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya pada Tujuan Strategis (T8) yang berbunyi “Peningkatan Sistem Tata Kelola Kementerian yang Transparan dan Akuntabel.

Perincian mengenai jenis kebutuhan regulasi dan pentingnya regulasi dalam mendukung pencapaian tujuan strategis Kemendikbud, dijelaskan pada tabel 3.14.

**Tabel 3.14**  
**Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan**  
**Tugas Teknis Lainnya Kemendikbud**

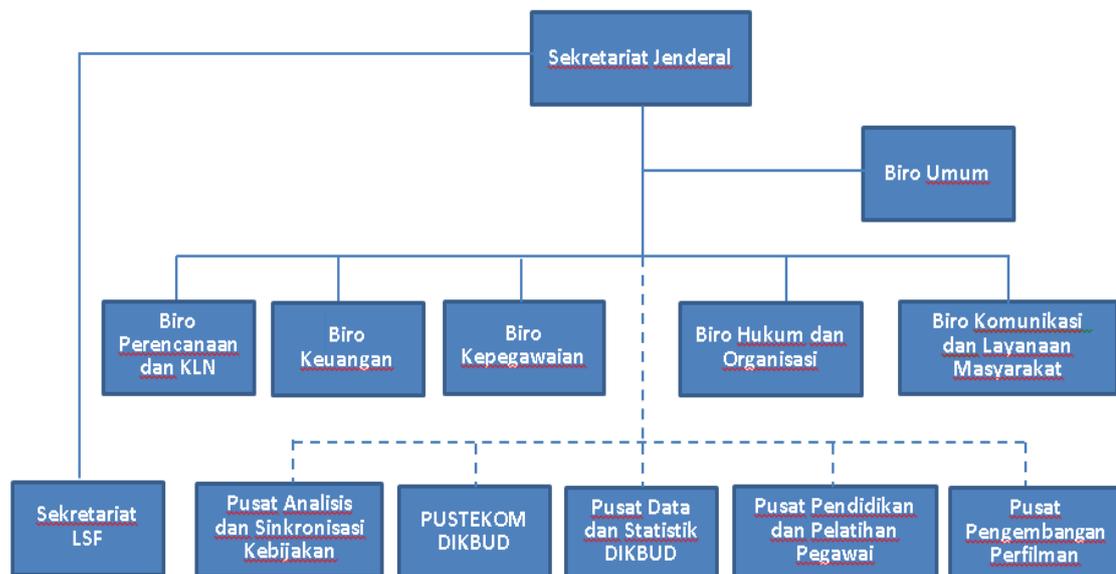
No	Kerangka Regulasi / Kebutuhan Regulasi	Urgensi Perlunya Regulasi
<b>Peningkatan Sistem Tata Kelola Kementerian yang Transparan dan Akuntabel</b>		
1	Peraturan Mendikbud mengenai Pengadaan Pegawai	Diharapkan proses perencanaan dan pengadaan pegawai sesuai dengan kebutuhan jabatan
2	Peraturan Mendikbud mengenai Pembayaran Tunjangan Kinerja	Penyaluran tunjangan kinerja agar sesuai dengan hasil evaluasi jabatan
3	Peraturan Mendikbud mengenai penataan pegawai	Penataan pegawai di lingkungan Kemdikbud agar sesuai dengan kompetensi
4	Peraturan Mendikbud mengenai pedoman <i>Assessment</i> pegawai	Penilaian kompetensi pegawai dapat dilakukan secara transparan dan komprehensif
5	Peraturan Mendikbud mengenai pembentukan <i>Assessment Center</i>	Tersedianya acuan pembentukan <i>Assessment Center</i> sebagai unit yang melaksanakan penilaian kompetensi pegawai
6	Peraturan Mendikbud mengenai Pedoman Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Diharapkan pembinaan pegawai dilingkungan Kemendikbud berbasis kompetensi
7	Peraturan Mendikbud mengenai Prosedur Operasional Pendataan Pegawai	Terwujudnya pembangunan database pegawai yang akurat dan terkini
8	Peraturan Mendikbud tentang pembinaan dan pengembangan SDM Aparatur	Tersedianya pedoman untuk pembinaan pegawai dilingkungan Kemendikbud yang berbasis kompetensi
9	Peraturan Mendikbud tentang tata kelola Kepegawaian	Diharapkan dapat terwujud pelayanan kepegawaian tepat waktu dan tepat sasaran
10	Peraturan Mendikbud tentang Pengelolaan Komunikasi dan Layanan Masyarakat	Tersedianya pedoman untuk Pengelolaan Komunikasi dan Layanan Masyarakat yang efektif dan memaksimalkan pelibatan publik
11	Peraturan Mendikbud tentang pedoman penyusunan dan penelaahan Rencana strategis eselon I, eselon II serta UPT Pusat di daerah dilingkungan Kemendikbud	Tersedianya pedoman untuk menyusun Rencana strategis bagi eselon I, eselon II serta UPT Pusat di daerah agar efektif dan akuntabel
12	Peraturan Mendikbud Tentang penyelenggaraan Ujian Nasional	Tersedianya pedoman bagi penyelenggara dan pelaksana Ujian Nasional agar terlaksana secara berintegritas

No	Kerangka Regulasi / Kebutuhan Regulasi	Urgensi Perlunya Regulasi
13	Tanda tangan digital (Digital Signature)	Merespon pelaksanaan UU 11 tahun 2008 ttg ITE, Permendikbud No. 99 tahun 2013 ttg Tata Kelola TIK di lingkungan Kemdikbud
14	Standar Jaringan Internet & Intranet Sekolah	Mendukung efektivitas pelaksanaan Kurikulum Nasional, Permendikbud No. 119 th 2014 ttg Sekolah Menengah Terbuka, PP no.17 th 2010 ttg Pendidikan Jarak Jauh,

#### D. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Jenderal Kemendikbud merupakan unsur pembantu pimpinan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Unit organisasi Eselon I Kemendikbud ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Sekretariat Jenderal Kemendikbud merupakan salah satu dari 8 unit organisasi Eselon I di lingkungan Kemendikbud. Struktur Organisasi Setjen dapat dilihat pada gambar 3.1.

Gambar 3.1.  
Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Kemendikbud



Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Mengingat tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kemendikbud bertanggung jawab atas seluruh aspek manajemen internal Kemendikbud. Selain itu, Sekretariat Jenderal berperan sebagai “penyedia layanan umum” bagi seluruh unit kerja Kemendikbud; sekaligus sebagai “simpul penghubung” antar unit utama serta antara Kemendikbud dengan lembaga eksternal lainnya.

## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Target kinerja sasaran kegiatan disusun dengan mengacu pada target kinerja sasaran strategis dan kinerja sasaran program yang telah ditetapkan berdasarkan unit Eselon II di lingkungan Setjen. Target kinerja yang dimaksud ditetapkan untuk setiap tahun selama kurun waktu lima tahun (2015—2019). Penjelasan dari setiap target kinerja Kemendikbud, adalah sebagai berikut:

### A. Target Kinerja Sasaran Kegiatan (SK)

#### 1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Layanan Prima Dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	KONDISI AWAL (2014)	TARGET				
				2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan Layanan Prima Dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian	Meningkatnya efektivitas perencanaan, penganggaran, pemantauan, analisis dan evaluasi program dan anggaran Sekretariat Jenderal	Persen	95	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pengelolaan dan pembinaan BMN dan persuratan kementerian, tatausaha pimpinan, keprotokolatan, serta kearsipan Setjen.	Persen	95	100	100	100	100	100
	Diterapkannya <i>e-office</i> Kementerian	Persen	90	100	100	100	100	100
	Diterapkannya tunjangan kinerja 100%	Persen	50	50	70	80	90	100
	Terlaksananya urusan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan dan kepegawaian Setjen	Persen	100	100	100	100	100	100

#### 2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Layanan Prima Dalam Pengadaan dan Penataan BMN serta Sarana dan Prasarana Kementerian

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	KONDISI AWAL (2014)	TARGET				
				2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan Layanan Prima Dalam Pengadaan dan Penataan BMN Serta Sarana dan Prasarana Kementerian	Meningkatnya kompetensi tenaga pengelola BMN	Persen	38	40	60	70	80	100
	Meningkatnya Ketertiban Pengelolaan BMN	Persen	95	100	100	100	100	100
	Meningkatnya keberfungsian Sarana dan Prasarana Kantor	Persen	95	100	100	100	100	100

**3. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan  
Peningkatan Pelayanan Prima Dalam Perencanaan, Penganggaran,  
dan Kerja Sama Luar Negeri**

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	KONDISI AWAL (2014)	TARGET				
				2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan Pelayanan Prima Dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Kerja Sama Luar Negeri	Tersedianya kebijakan jangka menengah (Renstra) dan Tahunan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud	Persen	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya dokumen perencanaan program, kegiatan, dan anggaran tahunan Kemendikbud yang telah diteliti dan disahkan	Persen	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Satker merealisasikan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Kementerian sesuai target yang ditetapkan	Persen	92,0	93,0	94,0	95,0	96,0	97,0
	Jumlah penyelenggaraan dan layanan kerja sama Luar Negeri dan Organisasi Internasional di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Organs/lbg	70	71	72	72	73	74
	Jumlah Layanan Atdikbud/DEWATAP UNESCO dan SILN	Orang	145	150	158	165	174	182
	Jumlah penerima bea siswa pemerintah RI	Orang	6.200	6.579	7.027	7.379	7.730	8.081
	Jumlah layanan tamu asing dan pelaksanaan ketatausahaan Biro	Orang	30	32	34	35	37	39

**4. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan  
Peningkatan Layanan Prima Bidang Pengelolaan Anggaran dan Akuntabilitas**

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	KONDISI AWAL (2014)	TARGET				
				2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan Layanan Prima Bidang Pengelolaan Anggaran dan Akuntabilitas	Persentase Daya serap Anggaran Kementerian	Persen	92	94	95	96	97	98
	Persentase Satker yang laporan Keuangannya sesuai dengan peraturan perundangan	Persen	95	100	100	100	100	100
	Skor kualitas LAKIP Kemendikbud menurut penilaian Menpan	Skor	75	80	80	80	80	80

**5. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan  
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara**

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	KONDISI AWAL (2014)	TARGET				
				2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara	Persentase pegawai baru yang direkrut dengan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan	%	45	50	65	70	80	90
	Persentase jabatan yang telah divalidasi	%	40	45	60	75	90	100
	Persentase standar kompetensi jabatan yang telah ditetapkan	%	40	45	60	75	90	100
	Persentase pegawai yang telah melaksanakan asesmen berdasarkan kompetensi	%	45	50	60	75	80	90
	Persentase pegawai yang telah melaksanakan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	%	75	90	100	100	100	100
	Persentase kelengkapan dan keakuratan basis data pegawai	%	50	60	75	90	100	100
	Persentase pegawai terlayani oleh sistem mutasi dengan tepat waktu	%	50	60	75	90	100	100
	Persentase pegawai dengan kinerja minimal "baik"	%	40	50	60	70	80	90
	Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat pegawai berbasis kompetensi	%	25	30	40	50	65	80
	Persentase pencapaian target kinerja program Biro Kepegawaian	%	84,48	90	95	98	98	98

**6. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan  
Peningkatan Layanan Prima Di Bidang Hukum dan Organisasi**

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	KONDISI AWAL (2014)	TARGET				
				2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan Layanan Prima Di Bidang Hukum dan Organisasi	Jumlah peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan	Naskah	160	170	180	190	200	200
	Jumlah masalah hukum (litigasi dan non litigasi) yang diselesaikan	Masalah Hukum	45	50	60	70	80	85
	Jumlah unit organisasi yang melakukan penataan organisasi	Unit Kerja	125	144	144	144	144	144
	Jumlah unit organisasi yang menerapkan tatalaksana yang efektif	Unit Kerja	38	40	45	50	55	60
	Jumlah jabatan di lingkungan Kemendikbud yang telah dianalisis dan diukur beban kerjanya	jabatan	410	425	425	425	425	425

**7. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan  
Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi  
(TIK) untuk Pendidikan dan Kebudayaan**

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	KONDISI AWAL (2014)	TARGET				
				2015	2016	2017	2018	2019
Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah satuan pendidikan yang terkoneksi jaringan online	Satuan Pendidikan	23.000	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000
	Jumlah satuan kerja/unit kerja yang terkoneksi jaringan <i>online</i>	Satker	650	650	650	650	650	650
	Jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan e-pembelajaran	Satuan Pendidikan	65.700	65.811	76.558	87.305	98.053	108.800
	Jumlah satuan pendidikan yang dapat mengakses siaran Radio dan Televisi Pendidikan	Satuan Pendidikan	107.500	107.571	110.260	113.016	115.842	118.738
	Jumlah Model Media berbasis Audio/Radio, Video/Televisi, dan Multimedia	Model	30	40	50	60	70	80
	Jumlah satuan kerja yang memanfaatkan e-Administrasi	Satker	300	320	340	380	400	450
	Jumlah Bahan Belajar/Media Pembelajaran berbasis TIK	Bahan Ajar	10.000	10.200	11.400	12.600	13.000	15.000
	Jumlah SDM yang terampil dalam mengembangkan dan memanfaatkan TIK untuk pendidikan	Orang	30.000	31.000	37.000	43.000	49.000	55.000

**8. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan  
Peningkatan Layanan Prima Di Bidang Komunikasi dan Layanan Masyarakat**

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	KONDISI AWAL (2014)	TARGET				
				2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan Layanan Prima Di Bidang Komunikasi dan Layanan Masyarakat	Persentase Kebijakan/Program Kemendikbud Yang Terpublikasi ke Masyarakat melalui Media	Persen	74	74	78	82	85	87
	Persentase Satker Kemendikbud yang Arsip dan Dokumentasinya Terintegrasi dengan pusat Arsip dan Dokumentasi Kementerian	Persen	50	50	55	60	65	70
	Terlayannya permintaan informasi dan dokumentasi dari pemangku kepentingan	Persen	87	87	88	89	90	91
	Persentase layanan Kemitraan Kemendikbud dengan Lembaga Negara, Organisasi/Lembaga Masyarakat dan Media	Persen	87	99	99	100	100	100
	Menurunnya/berkurangnya jumlah pengaduan dari pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan	Aduan	4.500	4.000	3.500	3.000	2.500	2.000

**9. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan  
Penyediaan Data, Statistik, dan Informasi Pendidikan dan Kebudayaan**

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	KONDISI AWAL (2014)	TARGET				
				2015	2016	2017	2018	2019
Penyediaan Data, Statistik, dan Informasi Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Satuan Pendidikan Dan Proses Pembelajaran yang terpalidasi Dalam <i>Data Warehouse</i>	Persen	65	70	80	85	90	97
	Persentase Tersedianya Data Referensi Pendidikan dan Wilayah	Persen	65	70	80	85	90	97
	Persentase Peserta Didik Dan PTK yang Tervalidasi Dalam <i>Data Warehouse</i>	Persen	35	40	45	60	75	80
	Jumlah Publikasi Statistik Pendidikan Nasional	Publikasi	11	12	12	12	12	12
	Jumlah Publikasi Hasil Pendayagunaan Data Pendidikan	Publikasi	23	25	27	29	31	33
	Layanan Data dan Statistik Pendidikan (Skala Kepuasan: 1 – 5)	Data	3	3,5	4	4	4,5	4,5
	Tersedianya Sistem Pengelolaan dan Pendayagunaan Data dan Statistik Pendidikan.	Persen	10	10	10	10	10	10
	Persentase SKPD Pendidikan Yang Telah Mengimplementasikan Sistem Verval Referensi Pendidikan	Persen	10	20	40	60	80	100
	Persentase SKPD Pendidikan Terkoordinasi Dalam Pengelolaan Dan Pendayagunaan Data Dan Statistik Pendidikan	Persen	10	10	10	10	10	10
	Persentase SKPD Yang Telah Terintegrasi Dengan Backbone Pengelolaan Data Pendidikan Kemendikbud	Persen	10	20	40	60	80	100
	Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja Dan Kepegawaian	Dokumen	23	23	23	23	23	23
	Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Dengan Peraturan Perundang – Undangan	Persen	100	100	100	100	100	100
	Persentase Tertib Pencatatan BMN	Persen	100	100	100	100	100	100

**10. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan  
Pengembangan Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh (PTJJ) Di Asia Tenggara**

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	KONDISI AWAL (2014)	TARGET				
				2015	2016	2017	2018	2019
Pengembangan Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh (PTJJ) Di Asia Tenggara	Jumlah Model yang Dikembangkan di Kawasan Asia Tenggara untuk bidang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), Matematika, Sains, Bahasa, Nutrisi & Kesehatan, dan Biologi tropika	Model	35	37	40	43	46	49
	Jumlah Penelitian Pengembangan, dan Evaluasi untuk bidang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), Matematika, Sains, Bahasa, Nutrisi & Kesehatan, dan Biologi tropika	Penelitian	145	149	176	182	188	194
	Jumlah Institusi di Kawasan Asia Tenggara yang Terlayani Melalui Pelatihan untuk bidang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), Matematika, Sains, Bahasa, Nutrisi & Kesehatan, dan Biologi tropika.	Unit Kerja	290	300	310	320	330	340
	PTK yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme untuk bidang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), Matematika, Sains, Bahasa, Nutrisi & Kesehatan, dan Biologi tropika	Unit Kerja	4.000	4.189	4.771	5.346	5.921	6.496
	Jumlah publikasi (newsletter, journal, proceeding, annual report, profil center) di bidang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), Matematika, Sains, Bahasa, Nutrisi & Kesehatan, dan Biologi tropika	Publikasi	43.000	43.279	43.379	43.479	43.579	43.679

**11. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan  
Peningkatan Kualitas Sensor Film**

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	KONDISI AWAL (2014)	TARGET				
				2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan Sensor Film	Jumlah Film dan Iklan Film yang disensor	Judul	45.050	46.100	46.200	46.300	46.400	46.500
	Persentase Sosialisasi dan Koordinasi Kebijakan Penyensoran	Persen	83	94	94	95	95	96
	Jumlah Fasilitasi Kelembagaan dan Keanggotaan	Daerah	10	11	12	13	14	15

## 12. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan Perfilman yang Berkualitas

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	KONDISI AWAL (2014)	TARGET				
				2015	2016	2017	2018	2019
Pengembangan Perfilman yang Berkualitas	Presentase meningkatnya kualitas kebijakan teknis di bidang pengembangan perfilman	%	40	45	50	55	60	65
	Presentase kualitas pemberian izin dan pengendalian kegiatan dan usaha perfilman	%	42	46	52	58	64	70
	Presentase pengembangan film dan apresiasi serta pemberian penghargaan di bidang perfilman	%	45	50	55	60	65	70
	Presentase meningkatnya pelaksanaan pengarsipan film	%	43	47	51	55	59	63
	Pembinaan tenaga teknis di bidang perfilman	Peserta	125	140	160	160	200	200

### B. Kerangka Pendanaan Sasaran Kegiatan (SK)

Kerangka pendanaan Renstra Sekretariat Jenderal 2015-2019, disusun dengan memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan. Selain yang terkait langsung dengan pengelolaan keuangan negara, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, agenda prioritas dalam RPJMN 2015-2019 terutama Nawacita nomor dua yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, diperhatikan pula Perpres No. 81 Tahun 2010 *Grand design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Selain itu juga mengacu pada Permendikbud Nomor. 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya Pengalokasian pendanaan selama periode 2015-2019 berpedoman pada tugas dan fungsi serta beban kerja yang menjadi tanggung jawab di masing-masing Biro dan Pusat dilingkungan Sekretariat Jenderal Kemendikbud. Penjelasan mengenai rancangan pendanaan selama lima tahun untuk masing-masing Biro dan Pusat-Pusat adalah sebagai berikut:

#### 1. Rancangan Alokasi Pendanaan

##### Peningkatan Layanan Prima Dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian

SASARAN KEGIATAN	IKK	KONDISI AWAL (2014)	ALOKASI (dalam jutaan rupiah)				
			2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan Layanan Prima Dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian	Meningkatnya efektivitas perencanaan, penganggaran, pemantauan, analisis dan evaluasi program dan anggaran Sekretariat Jenderal	12.083,9	12.083,9	12.083,9	12.083,9	12.083,9	12.990,2

SASARAN KEGIATAN	IKK	KONDISI AWAL (2014)	ALOKASI (dalam jutaan rupiah)				
			2015	2016	2017	2018	2019
	Terlaksananya pengelolaan dan pembinaan BMN dan persuratan kementerian, tatausaha pimpinan, keprotokolan, serta kearsipan Setjen.	2.308.325,4	2.308.325,4	2.387.935,2	2.466.441,6	2.549.470,2	2.740.680,4
	Diterapkannya e-office Kementerian	1.589,5	1.589,5	1.651,5	1.715,9	1.782,8	1.916,5
	Diterapkannya tunjangan kinerja 100%	2.932,7	2.932,7	3.049,1	3.049,1	3.049,1	3.277,8
	Terlaksananya urusan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan dan kepegawaian Setjen	3.770,1	3.770,1	3.781,3	3.781,3	3.781,3	4.064,9

**2. Rancangan Alokasi Pendanaan  
Peningkatan Layanan Prima Dalam Pengadaan dan Penataan BMN  
Serta Sarana dan Prasarana Kementerian**

SASARAN KEGIATAN	IKK	KONDISI AWAL (2014)	ALOKASI (dalam jutaan rupiah)				
			2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan Layanan Prima Dalam Pengadaan dan Penataan BMN Serta Sarana dan Prasarana Kementerian	Meningkatnya kompetensi tenaga pengelola BMN	66.951,5	66.951,5	23.630,0	23.630,0	23.630,0	25.402,2
	Meningkatnya Ketertiban Pengelolaan BMN	2.897,6	2.897,6	3.039,6	3.188,5	3.344,7	3.595,6
	Meningkatnya keberfungsian Sarana dan Prasarana Kantor	10.838,4	10.838,4	72.166,7	53.776,1	53.776,1	57.809,3

**3. Rancangan Alokasi Pendanaan  
Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran,  
dan Kerja Sama Luar Negeri**

SASARAN KEGIATAN	IKK	KONDISI AWAL (2014)	ALOKASI (dalam jutaan rupiah)				
			2015	2016	2017	2018	2019
<b>Peningkatan Pelayanan Prima</b>		<b>81.800</b>	<b>83.578</b>	<b>93.578</b>	<b>102.936</b>	<b>113.230</b>	<b>124.553</b>
<b>Dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Kerja Sama Luar Negeri</b>	Tersedianya kebijakan jangka menengah (Renstra) dan Tahunan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan	5.500	5.620	6.292	6.921	7.613	8.375
	Tersedianya dokumen perencanaan program, kegiatan, dan anggaran tahunan Kemendikbud yang telah diteliti dan disahkan	10.557	10.787	12.077	13.285	14.614	16.075
	Jumlah Satker merealisasikan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Kementerian sesuai target yang ditetapkan	4.000	4.087	4.576	5.034	5.537	6.091
	Jumlah penyelenggaraan dan layanan kerja sama Luar Negeri dan Organisasi Internasional di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	3.686	3.766	4.216	4.638	5.102	5.612
	Jumlah Layanan Atdikbud/DEWATAP UNESCO dan SILN	11.686	11.940	13.368	14.705	16.176	17.793
	Jumlah penerima bea siswa pemerintah RI	40.686	41.570	46.544	51.198	56.318	61.950
	Jumlah layanan tamu asing dan pelaksanaan ketatausahaan Biro	5.686	5.809	6.504	7.155	7.870	8.657

**4. Rancangan Alokasi Pendanaan Peningkatan  
Layanan Prima Bidang Pengelolaan Anggaran dan Akuntabilitas**

SASARAN KEGIATAN	IKK	KONDISI AWAL (2014)	ALOKASI (dalam jutaan rupiah)				
			2015	2016	2017	2018	2019
<b>Peningkatan Layanan Prima Bidang Pengelolaan Anggaran dan Akuntabilitas</b>		<b>243.701</b>	<b>243.701</b>	<b>243.701</b>	<b>268.071</b>	<b>294.878</b>	<b>324.366</b>
	Persentase Daya serap Anggaran Kementerian	16.201	16.201	16.201	17.821	19.603	21.564
	Persentase Satker yang laporan Keuangannya sesuai dengan peraturan perundangan	15.700	15.700	15.700	17.270	18.997	20.897
	Jumlah Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat bantuan peningkatan kapasitas	196.000	196.000	196.000	215.600	237.160	260.876
	Skor kualitas LAKIP Kemendikbud menurut penilaian Menpan	15.800	15.800	15.800	17.380	19.118	21.030

**5. Rancangan Alokasi Pendanaan**  
**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara**

SASARAN KEGIATAN	IKK	KONDISI AWAL (2014)	ALOKASI (dalam jutaan rupiah)				
			2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara	Persentase pegawai baru yang direkrut dengan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan	11.500	12.000	15.600	16.800	19.200	21.600
	Persentase jabatan yang telah divalidasi	2.800	3.000	1.500	750	750	750
	Persentase standar kompetensi jabatan yang telah ditetapkan	2.750	3.000	1.500	750	750	750
	Persentase pegawai yang telah melaksanakan asesmen berdasarkan kompetensi	2.300	2.500	3.000	3.750	4.000	4.500
	Persentase pegawai yang telah melaksanakan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	Persentase kelengkapan dan keakuratan basis data pegawai	3.800	4.000	5.000	6.000	6.700	6.700
	Persentase pegawai terlayani oleh sistem mutasi dengan tepat waktu	7.500	8.000	12.500	15.000	16.700	16.700
	Persentase pegawai dengan kinerja minimal "baik"	1.000	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800
	Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat pegawai berbasis kompetensi	7.700	8.000	7.500	6.000	5.000	4.000
	Persentase pencapaian target kinerja program Biro Kepegawaian	16.100	16.397	16.235	16.900	17.800	19.100

**6. Rancangan Alokasi Pendanaan**  
**Peningkatan Layanan Prima Di Bidang Hukum dan Organisasi**

SASARAN KEGIATAN	IKK	KONDISI AWAL (2014)	ALOKASI (dalam jutaan rupiah)				
			2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan Layanan Prima Di Bidang Hukum dan Organisasi	Jumlah peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan yang dibutuhkan	3.500,0	3.500,0	12.000,0	15.000,0	15.000,0	15.000,0
	Jumlah masalah hukum (litigasi dan non litigasi) yang diselesaikan	4.800,0	4.800,0	5.500,0	5.500,0	6.000,0	6.500,0
	Jumlah unit organisasi yang melakukan penataan organisasi	3.300,0	3.300,0	5.000,0	5.500,0	6.500,0	7.000,0
	Jumlah unit organisasi yang menerapkan tatalaksana yang efektif	12.600,0	12.600,0	18.250,0	21.500,0	25.500,0	27.000,0
	Jumlah jabatan di lingkungan Kemendikbud yang telah dianalisis dan diukur beban kerjanya	2.600,0	2.600,0	3.000,0	3.500,0	4.000,0	4.500,0

## 7. Rancangan Alokasi Pendanaan Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan dan Kebudayaan

SASARAN KEGIATAN	IKK	KONDISI AWAL (2014)	ALOKASI (dalam jutaan rupiah)				
			2015	2016	2017	2018	2019
Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan dan Kebudayaan		260.500	270.659	360.469	396.516	436.168	479.785
	Jumlah satuan pendidikan yang terkoneksi jaringan <i>online</i>	101.500	105.458	140.451	154.497	169.946	186.941
	Jumlah satuan kerja/unit kerja yang terkoneksi jaringan <i>online</i>	24.700	25.663	34.179	37.597	41.356	45.492
	Jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan e-pembelajaran	47.500	49.352	65.729	72.301	79.532	87.485
	Jumlah satuan pendidikan yang dapat mengakses siaran Radio dan Televisi Pendidikan	35.600	36.988	49.262	54.188	59.607	65.568
	Jumlah Model Media berbasis Audio/Radio, Video/Televisi, dan Multimedia	14.100	14.650	19.511	21.462	23.608	25.969
	Jumlah satuan kerja yang memanfaatkan e-Administrasi	10.000	10.390	13.838	15.221	16.743	18.418
	Jumlah Bahan Belajar/Media Pembelajaran berbasis TIK	10.000	10.390	13.838	15.221	16.743	18.418
	Jumlah SDM yang terampil dalam mengembangkan dan memanfaatkan TIK untuk pendidikan	17.100	17.767	23.662	26.028	28.631	31.495

## 8. Rancangan Alokasi Pendanaan Peningkatan Layanan Prima Di Bidang Komunikasi dan Layanan Masyarakat

SASARAN KEGIATAN	IKK	KONDISI AWAL (2014)	ALOKASI (dalam jutaan rupiah)				
			2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan Layanan Prima Di Bidang Komunikasi dan Layanan Masyarakat	Persentase Kebijakan/Program Kemendikbud Yang Terpublikasi ke Masyarakat melalui Media	20.232	20.232	22.846	25.131	27.644	30.408
	Persentase Satker Kemendikbud yang Arsip dan Dokumentasinya Terintegrasi dengan pusat Arsip dan Dokumentasi Kementerian	763,7	763,7	863,7	963,7	1.060	1.150
	Terlayannya permintaan informasi dan dokumentasi dari pemangku kepentingan	12.475	12.475	13.111	14.422	15.865	17.451
	Persentase layanan Kemitraan Kemendikbud dengan Lembaga Negara, Organisasi/Lembaga Masyarakat dan Media	21.951	21.951	25.757	28.332	31.165	34.282
	Menurunnya/berkurangnya jumlah pengaduan dari pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan	12.105	12.105	16.007	17.608	19.369	21.306

**9. Rancangan Alokasi Pendanaan  
Penyediaan Data, Statistik, dan Informasi Pendidikan dan Kebudayaan**

SASARAN KEGIATAN	IKK	KONDISI AWAL (2014)	ALOKASI (dalam jutaan rupiah)				
			2015	2016	2017	2018	2019
Penyediaan Data, Statistik, dan Informasi Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Satuan Pendidikan & Proses Pembelajaran yang terpalidasi Dalam <i>Data Warehouse</i>	4.371,0	4.371,0	4.808,0	5.245,0	5.682,0	6.119,0
	Persentase Tersedianya Data Referensi Pendidikan dan Wilayah	2.804,0	2.804,0	3.088,0	3.372,0	3.656,0	3.940,0
	Persentase Peserta Didik Dan PTK yang Tervalidasi Dalam <i>Data Warehouse</i>	6.254,0	6.254,0	6.281,0	6.309,0	6.338,0	9.142,0
	Jumlah Publikasi Statistik Pendidikan Nasional	1.177,0	1.177,0	1.177,0	1.275,0	1.275,0	1.275,0
	Jumlah Publikasi Hasil Pendayagunaan Data Pendidikan	5.642,0	5.642,0	6.132,0	6.622,0	7.113,0	7.603,0
	Layanan Data dan Statistik Pendidikan (Skala Kepuasan: 1 – 5)	11,0	11,0	16,0	21,0	26,0	31,0
	Tersedianya Sistem Pengelolaan dan Pendayagunaan Data dan Statistik Pendidikan.	1.500,0	1.500,0	1.650,0	1.800,0	1.950,0	2.100,0
	Persentase SKPD Pendidikan Yang Telah Mengimplementasikan Sistem Verval Referensi Pendidikan	2.739,0	2.739,0	3.287,0	3.835,0	4.383,0	4.931,0
	Persentase SKPD Pendidikan Terkoordinasi Dalam Pengelolaan & Pendayagunaan Data Dan Statistik Pendidikan	406,0	406,0	488,0	570,0	652,0	734,0
	Persentase SKPD Yang Telah Terintegrasi Dengan <i>Backbone</i> Pengelolaan Data dikbud	4.358,0	4.358,0	6.537,0	8.716,0	10.895,0	13.074,0
	Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja Dan Kepegawaian	12.944,0	12.944,0	12.944,0	12.944,0	12.944,0	12.944,0
	Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Dengan Peraturan Perundang – Undangan	3.216,0	3.216,0	3.216,0	3.216,0	3.216,0	3.216,0
	Persentase Tertib Pencatatan BMN	7.714,0	7.714,0	7.714,0	7.714,0	7.714,0	7.714,0

**10. Rancangan Alokasi Pendanaan  
Pengembangan Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh (PTJJ) Di Asia Tenggara**

SASARAN KEGIATAN	IKK	KONDISI AWAL (2014)	ALOKASI (dalam jutaan rupiah)				
			2015	2016	2017	2018	2019
Pengembangan Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh (PTJJ) Di Asia Tenggara	Jumlah Model yang Dikembangkan di Kawasan Asia Tenggara untuk bidang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), Matematika, Sains, Bahasa, Nutrisi & Kesehatan, dan Biologi tropika	4.912,3	4.912,3	5.280,7	5.676,8	6.102,5	6.560,2
	Jumlah Penelitian Pengembangan, dan Evaluasi untuk bidang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), Matematika, Sains, Bahasa, Nutrisi & Kesehatan, dan Biologi tropika	11.272,3	11.272,3	12.117,7	13.026,5	14.003,5	15.053,8

SASARAN KEGIATAN	IKK	KONDISI AWAL (2014)	ALOKASI (dalam jutaan rupiah)				
			2015	2016	2017	2018	2019
	Jumlah Institusi di Kawasan Asia Tenggara yang Terlayani Melalui Pelatihan untuk bidang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), Matematika, Sains, Bahasa, Nutrisi & Kesehatan, dan Biologi tropika.	2.208,4	2.208,4	2.374,0	2.552,1	2.743,5	2.949,3
	PTK yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme untuk bidang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), Matematika, Sains, Bahasa, Nutrisi & Kesehatan, dan Biologi tropika	24.254,4	24.254,4	26.073,5	28.029,0	30.131,2	32.391,1
	Jumlah publikasi ( <i>newsletter, journal, proceeding, annual report, profil center</i> ) di bidang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), Matematika, Sains, Bahasa, Nutrisi & Kesehatan, dan Biologi tropika	12.178,4	12.178,4	13.091,8	14.073,7	15.129,2	16.263,9

### 11. Rancangan Alokasi Pendanaan Peningkatan Kualitas Sensor Film

SASARAN KEGIATAN	IKK	KONDISI AWAL (2014)	ALOKASI (dalam jutaan rupiah)				
			2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan Sensor Film	Jumlah Film dan Iklan Film yang disensor	35.580,0	37.580,0	40.398,5	43.428,4	46.685,5	50.186,9
	Persentase Sosialisasi dan Koordinasi Kebijakan Penyensoran	3.840,0	4.340,0	4.665,5	5.015,4	5.391,6	5.795,9
	Jumlah Fasilitasi Kelembagaan dan Keanggotaan	2.489,0	2.989,0	3.213,2	3.454,2	3.713,2	3.991,7

### 12. Rancangan Alokasi Pendanaan Pusat Pengembangan Perfilman

SASARAN KEGIATAN	IKK	KONDISI AWAL (2014)	ALOKASI (dalam jutaan rupiah)				
			2015	2016	2017	2018	2019
Terselenggarakan pengembangan perfilman yang berkualitas dan berkarakter sesuai budaya Indonesia	Persentase meningkatnya kualitas kebijakan teknis di bidang pengembangan perfilman	Unit baru	19.500	109.000	133.919	141.577	147.352
	Persentase kualitas pemberian izin dan pengendalian kegiatan dan usaha perfilman	Unit baru	2.000	2.000	2.457	2.598	2.704
	Persentase pengembangan film dan apresiasi serta pemberian penghargaan di bidang perfilman	Unit baru	2.000	2.000	2.457	2.598	2.704
	Persentase meningkatnya pelaksanaan pengarsipan film	Unit baru	10.000	10.000	12.286	12.989	13.519
	Pembinaan tenaga teknis di bidang perfilman	Unit baru	4.000	4.000	4.914	5.195	5.407

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Rencana Strategis Setjen Kemendikbud Tahun 2015—2019 merupakan kesinambungan dari Renstra Setjen Kemendikbud Tahun 2010—2014. Penyusunan Renstra Setjen Kemendikbud Tahun 2015—2019 dilakukan melalui berbagai tahapan, antara lain mengidentifikasi, verifikasi, menganalisis data, termasuk koordinasi dengan Satker, dan partisipasi seluruh pejabat di lingkungan Setjen. Renstra ini juga telah mengakomodasi semua tugas dan fungsi Setjen Kemendikbud sesuai dengan Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Renstra Setjen Tahun 2015—2019 digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang hendak dicapai pada periode 2015—2019, serta merupakan dasar dan acuan bagi Unit Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Setjen untuk menyusun (1) Rencana Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL; (3) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan; (4) Laporan Tahunan; dan (5) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Indikator Kinerja Program (IKP) yang berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan dan/atau, kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama, dan dapat digunakan sebagai instrumen manajemen kinerja dalam perbaikan kinerja, dan peningkatan akuntabilitas kinerja di masa depan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Sekretariat Jenderal mendapat tugas untuk mengawal Kementerian dalam meraih dan mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan penilaian tertinggi dari target Kementerian yang diberikan oleh tim audit eksternal. Di sisi lain, tugas penting yang terus dilaksanakan adalah mengelola Barang Milik Negara dan seluruh aset Kemendikbud yang tersebar di seluruh Indonesia, mempertahankan skor tertinggi LAKIP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dinilai oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan menuntaskan reformasi birokrasi di lingkungan Kemendikbud.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai tolak ukur pencapaian dan keberhasilan jajaran unit kerja setingkat eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal juga telah disesuaikan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan perubahan struktur Kemendikbud. Selanjutnya IKK ini harus disusun rencana pencapaiannya ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan diperjanjikan ke dalam format Kontrak Kinerja yang memuat, antara lain: program utama yang dilaksanakan, sasaran yang akan dicapai, output (keluaran) yang akan diwujudkan, dan janji *outcome* (hasil), yang pada setiap akhir tahun diminta pertanggungjawabannya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja dari unit kerja masing-masing.

Dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, baik di lingkungan Kementerian maupun pada jajaran eselon II Sekretariat Jenderal, perlu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mapan dan dapat dijadikan sebagai Pilar Transformasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan demi terwujudnya *Sistem Tata Kelola Yang Andal dalam Menjamin Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan dan Kebudayaan* menuju Kementerian Bertatakelola Terbaik dengan motto **“Bekerja dengan Amanah, Memberi dan Melayani yang terbaik”**.

## LAMPIRAN

1. Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Sekretariat Jenderal
2. Lampiran 2: Matriks Kerangka Regulasi

# LAMPIRAN

---

1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Sekretariat Jenderal
2. Matriks Kerangka Regulasi

# **LAMPIRAN-1**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>									#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
SS 14	<b>Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kemendikbud</b>														
IKSS 14.1	Skor LAKIP minimal sebesar 80	skor	72	80	80	80	80	80							
SS15	<b>Dipertahankannya opini Laporan Keuangan Kemendikbud Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)</b>														
IKSS 15.1	Laporan Keuangan Kemendikbud mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
SS16	<b>Meningkatnya pelibatan publik dalam tata kelola pendidikan dan kebudayaan</b>														
IKSS 16.1	Indeks kepuasan pemangku kepentingan kemendikbud sebesar 77	Indeks	72,00	73,00	74,00	75,00	76,00	77,00							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
<b>01 - PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA</b>										3.887.364	3.187.041	3.537.414	3.876.754	4.243.378	18.731.952	<b>SETJEN</b>
<b>SP.1.1</b>	<b>Terselenggaranya sistem perencanaan yang andal</b>															
IKP.1.1.1	Persentase sasaran Renstra dan RKA tahunan yang dipenuhi oleh satuan kerja Kemendikbud	%	80,00	84,00	88,00	92,00	96,00	100,00								
IKP.1.1.2	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud di luar negeri terhadap layanan Atdik/DEWATAP UNESCO dan SLN	%	89,00%	92,00%	94,00%	96,00%	98,00%	100,00%								
IKP.1.1.3	Persentase tindak lanjut kerja sama Bilateral, Regional, dan Multilateral Bidang Dikbud	%	72,00%	78,00%	81,00%	84,00%	87,00%	90,00%								
<b>SP.1.2</b>	<b>Meningkatnya pemanfaatan sistem pembinaan dan pengelolaan keuangan yang akuntabel</b>															
IKP.1.2.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kemendikbud	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP								
<b>SP.1.3</b>	<b>Meningkatnya pemanfaatan sistem pengelolaan dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN)</b>															
IKP.1.3.1	Persentase Pegawai yang melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan kompetensi	%	30,00%	47,00%	56,00%	66,00%	77,00%	85,00%								
<b>SP.1.4</b>	<b>Terselenggaranya pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, layanan bantuan hukum, dan tertatanya organisasi dan tatalaksana yang efektif</b>															
IKP.1.4.1	Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang dibutuhkan	Naskah	162	150	160	170	180	190								
IKP.1.4.2	Jumlah masalah hukum (litigasi dan nonlitigasi) yang diselesaikan	Masalah Hukum	46	50	60	70	80	85								
IKP.1.4.3	Jumlah unit organisasi yang melakukan penataan organisasi	Uker	140	140	140	140	140	140								
IKP.1.4.4	Jumlah unit organisasi yang menerapkan tata laksana yang efektif	Uker	140	140	140	140	140	140								
IKP.1.4.5	Jumlah Jabatan di lingkungan Kemendikbud yang telah di analisis dan diukur beban kerjanya	Jabatan	425	425	425	425	425	425								
<b>SP.1.5</b>	<b>Meningkatnya pendayagunaan teknologi dan informasi, serta komunikasi untuk pendidikan</b>															
IKP.1.5.1	Persentase pengembangan, pembinaan, dan Pendayagunaan TIK untuk pendidikan	%	47,60%	52,11%	56,62%	61,39%	66,68%	70,61%								
IKP.1.5.2	Jumlah Bahan Belajar/Media Pembelajaran berbasis TIK	Judul	9.000	10.200	11.400	12.600	13.800	15.000								
IKP.1.5.3	Jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan e-pembelajaran	satuan pendidikan	55.063	65.811	76.558	87.305	98.053	108.800								
IKP.1.5.4	Persentase E-Layanan Kementerian yang sesuai dengan tata kelola TIK	%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%								
<b>SP.1.6</b>	<b>Meningkatnya akses layanan pendidikan antarnegara ASEAN</b>															
IKP.1.6.1	Persentase fasilitas pembelajaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan SEAMEO	%	60,00%	67,10%	74,20%	81,30%	88,40%	95,50%								
IKP.1.6.2	Persentase peningkatan akses layanan pendidikan antarnegara ASEAN	%	50,00%	58,30%	66,60%	74,90%	83,20%	91,50%								
<b>SP.1.7</b>	<b>Meningkatnya pemanfaatan data pokok dan statistik pendidikan dan kebudayaan</b>															
IKP.1.7.1	Persentase tingkat validasi data bidang pendidikan dan kebudayaan	%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	95,00%	100,00%								
IKP.1.7.2	Persentase penyebaran hasil pendayagunaan data dan statistik	%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	95,00%								
IKP.1.7.3	Persentase terintegrasinya pendataan pusat dan daerah	%	15,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%								
<b>SP.1.8</b>	<b>Meningkatnya kualitas layanan Komunikasi dan layanan masyarakat</b>															

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
IKP.1.8.1	Indeks kepuasan pemangku kepentingan kemendikbud	indeks	72	73	74	75	76	77							
IKP.1.8.2	Persentase pengaduan masyarakat yang direspon secara cepat dan efektif	%	25,00%	50,00%	65,00%	80,00%	90,00%	100,00%							
<b>SP.1.9</b>	<b>Meningkatnya kualitas pengembangan perfilman, penyensoran film dan iklan film Indonesia</b>														
IKP.1.9.1	Persentase film dan iklan film yang lulus sensor	%	83,00%	83,00%	86,00%	89,00%	92,00%	95,00%							
IKP.1.9.2	Persentase meningkatnya kualitas film dan iklan sesuai dengan nilai luhur budaya Indonesia	%	45,00%	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%							
IKP.1.9.3	Presentase perizinan dan peredaran film	%						70,00%							
IKP.1.9.4	Presentase meningkatnya apresiasi dan tenaga perfilman	%						70,00%							
<b>SP.1.10</b>	<b>Meningkatnya kualitas Pengembangan Perfilman</b>														
IKP.1.10.1	Presentase kualitas pemberian izin dan pengendalian kegiatan dan usaha perfilman		-	46 %	52 %	58 %	64 %	70%							
IKP.1.10.2	Presentase pengembangan film dan apresiasi serta pemberian penghargaan di bidang perfilman		-	50%	55%	60%	65%	70%							
<b>SP.1.11</b>	<b>Terseleenggaranya tata kelola Setjen dan pengelolaan BMN Kementerian yang akuntabel</b>														
IKP.1.11.1	Indeks kepuasan layanan setjen	indeks	60,00%	87,00%	89,00%	91,00%	93,00%	95,00%							
IKP.1.11.2	Persentase aset Kemendikbud yang telah ditetapkan status penggunaannya dan telah tersertifikasi	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
<b>SP.1.12</b>	<b>Terseleenggaranya pendidikan dan pelatihan pegawai</b>														
IKP.1.12.1	Jumlah aparatur Kemendikbud yang mengikuti diklat jabatan, teknis, dan fungsional	%	20,00%	30,00%	41,00%	50,00%	60,00%	100,00%							
IKP.1.12.2	Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan pengembangan tenaga kependidikan untuk seluruh jenjang pendidikan	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
<b>SP1.13</b>	<b>Terseleenggaranya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan</b>														
IKP1.13.1	Jumlah dokumen analisis dan sinkronisasi kebijakan	dokumen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
<b>1985</b>	<b>Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian</b>								2.328.702	1.135.010	1.248.511	1.373.362	1.510.698	7.596.281	Biro Umum
<b>SK.1.1985.1</b>	<b>Peningkatkan layanan prima dalam menunjang fungsi pelayanan umum Kementerian</b>								2.328.702	1.135.010	1.248.511	1.373.362	1.510.698	7.596.281	
IKK.1.1985.1.1	Meningkatnya efektivitas perencanaan, penganggaran, pemantauan, analisis dan evaluasi program dan anggaran Setjen	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
IKK.1.1985.1.2	Terlaksananya pengelolaan dan pembinaan BMN dan persuratan kementerian, tatusaha pimpinan, keprotokol, serta kearsipan Setjen	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
IKK.1.1985.1.3	Diterapkannya e-office Kementerian	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
IKK.1.1985.1.4	Diterapkannya tunjangan kinerja 100%	%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%							
IKK.1.1985.1.5	Terlaksananya urusan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan dan kepegawaian Setjen	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
<b>1980</b>	<b>Peningkatan Layanan Prima dalam Pengadaan dan Penataan BMN serta Sarana dan Prasarana Kementerian</b>								80.688	188.630	207.493	228.242	251.066	956.119	Biro Umum
<b>SK.1.1980.1</b>	<b>Tercapainya Peningkatkan Layanan Prima dalam Pengadaan dan Penataan BMN serta Sarana dan Prasarana Kementerian</b>								80.688	188.630	207.493	228.242	251.066	956.119	
IKK.1.1980.1.1	Meningkatnya kompetensi tenaga pengelola BMN	%	35,00	40,00	60,00	70,00	80,00	100,00							
IKK.1.1980.1.2	Meningkatnya ketertiban pengelolaan BMN	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
IKK.1.1980.1.3	Meningkatnya keberfungsian sarana dan prasarana kantor	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00								
1984	<b>Peningkatan pelayanan prima dalam perencanaan, penganggaran, dan kerja sama luar negeri</b>								483.320	431.875	475.062	522.568	574.825	2.487.650	BPKLN	
SK.1.1984.1	<b>Tercapainya peningkatan pelayanan prima dalam perencanaan dan penganggaran</b>								83.578	93.578	102.936	113.230	124.553	517.876		
IKK.1.1984.1.1	Tersedianya kebijakan jangka menengah (Renstra) dan tahunan pembangunan pendidikan dan kebudayaan Kemendikbud	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%								
IKK.1.1984.1.2	Tersedianya dokumen perencanaan program, kegiatan, dan anggaran tahunan Kemendikbud yang telah diteliti dan disahkan	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%								
IKK.1.1984.1.3	Jumlah satker merealisasikan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Kementerian sesuai target yang ditetapkan	%	90,00%	93,00%	94,00%	95,00%	96,00%	97,00%								
SK.1.1984.2	<b>Tercapainya peningkatan pelayanan prima dalam kerja sama luar negeri</b>								399.741	338.296	372.126	409.339	450.273	1.969.775		
IKK.1.1984.2.1	Jumlah penyelenggaraan dan layanan kerja sama luar negeri dan organisasi internasional di bidang pendidikan dan kebudayaan	kerjasama	70	71	72	72	73	74								
IKK.1.1984.2.2	Jumlah layanan Atdik/DEWATAP UNESCO dan SILN	layanan	145	150	158	165	174	182								
IKK.1.1984.2.3	Jumlah penerima beasiswa pemerintah RI	siswa	6.500	6.579	7.027	7.379	7.730	8.081								
IKK.1.1984.2.4	Jumlah layanan tamu asing dan pelaksanaan ketatausahaan biro	tamu	30	32	34	35	37	39								
1983	<b>Peningkatan pelayanan prima bidang pengelolaan anggaran dan akuntabilitas</b>								243.701	243.701	268.071	294.878	324.366	1.374.717	Biro Keuangan	
SK.1.1983.1	<b>Tercapainya peningkatan pelayanan prima bidang pengelolaan anggaran dan akuntabilitas</b>								243.701	243.701	268.071	294.878	324.366	1.374.717		
IKK.1.1983.1.1	Persentase daya serap anggaran Kementerian	%	93,00%	94,00%	95,00%	96,00%	97,00%	98,00%								
IKK.1.1983.1.2	Persentase satker yang laporan Keuangannya sesuai dengan peraturan perundangan	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%								
IKK.1.1983.1.3	Jumlah lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat bantuan peningkatan kapasitas	lembaga		445	545	600	625	675								
IKK.1.1983.1.4	Skor kualitas LAKIP Kemendikbud menurut penilaian Menpan	skor	75	80	80	80	80	80								
1982	<b>Peningkatan efektivitas pengelolaan dan pembinaan aparatur sipil negara</b>								59.447	70.199	77.219	84.941	93.435	385.243	Biro Kepegawai	
SK.1.1982.1	<b>Tercapainya peningkatan efektivitas pengelolaan dan pembinaan aparatur sipil negara (ASN)</b>								59.447	70.199	77.219	84.941	93.435	385.243		
IKK.1.1982.1.1	Persentase pegawai baru yang direkrut dengan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan	%	45,00%	50,00%	65,00%	70,00%	80,00%	90,00%								
IKK.1.1982.1.2	Persentase jabatan yang telah divalidasi	%	40,00%	45,00%	60,00%	75,00%	90,00%	100,00%								
IKK.1.1982.1.3	Persentase standar kompetensi jabatan yang telah ditetapkan	%	40,00%	45,00%	60,00%	75,00%	90,00%	100,00%								
IKK.1.1982.1.4	Persentase pegawai yang telah melaksanakan asesmen berdasarkan kompetensi	%	45,00%	50,00%	60,00%	75,00%	80,00%	90,00%								
IKK.1.1982.1.5	Persentase pegawai yang telah melaksanakan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	%	75,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%								
IKK.1.1982.1.6	Persentase kelengkapan dan keakuratan basis data pegawai	%	50,00%	60,00%	75,00%	90,00%	100,00%	100,00%								
IKK.1.1982.1.7	Persentase pegawai terlayani oleh sistem mutasi dengan tepat waktu	%	50,00%	60,00%	75,00%	90,00%	100,00%	100,00%								
IKK.1.1982.1.8	Persentase pegawai dengan kinerja minimal "baik"	%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%								

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
IKK.1.1982.1.9	Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat pegawai berbasis kompetensi	%	25,00%	30,00%	40,00%	50,00%	65,00%	80,00%								
IKK.1.1982.1.10	Persentase pencapaian target kinerja program Biro Kepegawaian	%	86,16%	90,00%	95,00%	98,00%	98,00%	98,00%								
<b>1981</b>	<b>Peningkatan layanan prima di bidang hukum dan organisasi</b>								26.868	31.368	34.505	37.955	41.751	172.447	<b>Biro</b>	
<b>SK.1.1981.1</b>	<b>Meningkatnya layanan di bidang hukum dan organisasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</b>								26.868	31.368	34.505	37.955	41.751	172.447		
IKK.1.1981.1.1	Jumlah peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan yang diterbitkan	naskah	145	150	160	170	180	200								
IKK.1.1981.1.2	Jumlah kasus dan masalah hukum yang diselesaikan	laporan	30	32	35	35	35	37								
IKK.1.1981.1.3	Jumlah unit organisasi yang melakukan penataan organisasi	unit	45	50	55	60	60	65								
IKK.1.1981.1.4	Jumlah unit organisasi yang menerapkan tatalaksana yang efektif	unit	35	40	45	50	55	60								
IKK.1.1981.1.5	Jumlah jabatan di lingkungan Kemendikbud yang dianalisis dan diukur beban kerjanya	jabatan	25	30	35	40	45	50								
<b>1991</b>	<b>Pengembangan dan pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk pendidikan</b>								270.659	360.469	396.516	436.168	479.785	1.943.597	<b>Pustekom</b>	
<b>SK.1.1991.1</b>	<b>Terlaksananya pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pendidikan</b>								270.659	360.469	396.516	436.168	479.785	1.943.597		
IKK.1.1991.1.1	Jumlah satuan pendidikan yang terkoneksi jaringan online	satuan pendidikan	23.000	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000								
IKK.1.1991.1.2	Jumlah satuan kerja/unit kerja yang terkoneksi jaringan online	satker	650	650	650	650	650	650								
IKK.1.1991.1.3	Jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan e-pembelajaran	satuan pendidikan	65.700	65.811	76.558	87.305	98.053	108.800								
IKK.1.1991.1.4	Jumlah satuan pendidikan yang dapat mengakses siaran radio dan televisi pendidikan	satuan pendidikan	107.500	107.571	110.260	113.016	115.842	118.738								
IKK.1.1991.1.5	Jumlah e-layanan yang menggunakan infrastruktur TIK Kementerian (aplikasi)	layanan	20	35	50	65	80	100								
IKK.1.1991.1.6	Jumlah model media berbasis audio/radio, video/televisi, dan multimedia	model	30	40	50	60	70	80								
IKK.1.1991.1.7	Jumlah satuan kerja yang memanfaatkan e-administrasi	satker	300	320	340	380	400	450								
IKK.1.1991.1.8	Jumlah bahan belajar/media pembelajaran berbasis TIK	bahan ajar	10.000	10.200	11.400	12.600	13.800	15.000								
IKK.1.1991.1.9	Jumlah SDM yang terampil dalam mengembangkan dan memanfaatkan TIK untuk pendidikan	orang	30.000	31.000	37.000	43.000	49.000	55.000								
<b>1987</b>	<b>Peningkatan layanan prima di bidang komunikasi dan layanan masyarakat</b>								66.174	92.029	101.232	111.355	122.490	493.280	<b>BKLM</b>	
<b>SK.1.1987.1</b>	<b>Peningkatan layanan prima di bidang informasi dan kehumasan</b>								66.174	92.029	101.232	111.355	122.490	493.280		
IKK.1.1987.1.1	Persentase kebijakan/program Kemendikbud yang terpublikasi ke masyarakat melalui media	%	74,00%	74,00%	78,00%	82,00%	85,00%	87,00%								
IKK.1.1987.1.2	Persentase Satker Kemendikbud yang arsip dan dokumentasinya terintegrasi dengan pusat arsip dan dokumentasi Kementerian	%	50,00%	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%								
IKK.1.1987.1.3	Terlayannya permintaan informasi dan dokumen dari pemangku kepentingan	%	87,00%	87,00%	88,00%	89,00%	90,00%	91,00%								
IKK.1.1987.1.4	Persentase layanan kemitraan Kemendikbud dengan lembaga negara, organisasi/lembaga masyarakat dan media	%	87,00%	99,00%	99,00%	100,00%	100,00%	100,00%								

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
IKK.1.1987.1.5	Menurunnya/berkurangnya jumlah pengaduan dari pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan	pengaduan	4.500	4.000	3.500	3.000	2.500	2.000								
<b>1986</b>	<b>Penyediaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan</b>									55.875	75.844	83.428	91.771	100.948	407.867	<b>PDSPK</b>
<b>SK.1.1986.1</b>	<b>Penyediaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan</b>									55.875	75.844	83.428	91.771	100.948	407.867	
IKK.1.1986.1.1	Persentase satuan pendidikan dan proses pembelajaran yang tervalidasi dalam data <i>warehouse</i>	%	65,00%	70,00%	80,00%	85,00%	90,00%	97,00%								
IKK.1.1986.1.2	Persentase tersedianya data referensi pendidikan dan wilayah	%	65,00%	70,00%	80,00%	85,00%	90,00%	97,00%								
IKK.1.1986.1.3	Persentase peserta didik dan PTK yang tervalidasi dalam data <i>warehouse</i>	%	35,00%	40,00%	45,00%	60,00%	75,00%	90,00%								
IKK.1.1986.1.4	Jumlah publikasi statistik pendidikan nasional	publikasi	11	12	12	13	13	13								
IKK.1.1986.1.5	Jumlah publikasi hasil pendayagunaan data pendidikan	publikasi	23	25	27	29	31	33								
IKK.1.1986.1.6	Layanan data dan statistik pendidikan (skala kepuasan : 1 – 5)	sistem	3,0	3,5	4,0	4,0	4,5	4,5								
IKK.1.1986.1.7	Tersedianya sistem pengelolaan dan pendayagunaan data dan statistik pendidikan.	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%								
IKK.1.1986.1.8	Persentase SKPD pendidikan yang telah mengimplementasikan sistem verval referensi pendidikan	%	10,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%								
IKK.1.1986.1.9	Persentase SKPD pendidikan terkoordinasi dalam pengelolaan dan pendayagunaan data dan statistik pendidikan	SKPD	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%								
IKK.1.1986.1.10	Persentase SKPD yang telah terintegrasi dengan backbone pengelolaan data pendidikan Kemendikbud	%	10,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%								
IKK.1.1986.1.11	Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan kepegawaian	dokumen	23	23	23	23	23	23								
IKK.1.1986.1.12	Persentase kesesuaian laporan keuangan dengan peraturan perundang-undangan	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%								
IKK.1.1986.1.13	Persentase tertib pencatatan BMN	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%								
<b>4079</b>	<b>Pengembangan pendidikan terbuka dan jarak jauh (PTJJ) Di Asia Tenggara</b>									87.450	93.730	103.103	113.414	124.755	522.453	<b>Seamolec</b>
<b>SK.1.4079.1</b>	<b>Pengembangan pendidikan terbuka dan jarak jauh (PTJJ) Di Asia Tenggara</b>									87.450	93.730	103.103	113.414	124.755	522.453	
IKK.1.4079.1.1	Jumlah model yang dikembangkan di kawasan Asia Tenggara untuk bidang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), matematika, sains, bahasa, nutrisi & kesehatan, dan biologi tropika	model	35	68	40	43	46	49								
IKK.1.4079.1.2	Jumlah penelitian pengembangan, dan evaluasi untuk untuk bidang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), matematika, sains, bahasa, nutrisi & kesehatan, dan biologi tropika	judul	145	99	176	182	188	194								
IKK.1.4079.1.3	Jumlah institusi di kawasan Asia Tenggara yang melayani melalui pelatihan untuk untuk bidang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), matematika, sains, bahasa, nutrisi & kesehatan, dan biologi tropika	institusi	290	104	314	324	334	344								
IKK.1.4079.1.4	PTK yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme untuk untuk bidang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), matematika, sains, bahasa, nutrisi & kesehatan, dan biologi tropika	PTK	4.000	4.317	4.596	5.166	5.736	6.306								
IKK.1.4079.1.5	Jumlah publikasi (newsletter, journal, proceeding, annual report, profil center) di untuk bidang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), matematika, sains, bahasa, nutrisi & kesehatan, dan biologi tropika	publikasi	43.000	70.058	63.862	64.322	64.552	64.432			333.852	352.942	367.338			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Base Line 2014	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
5173	Pengembangan perfilman , penyensoran film dan iklan film Indonesia								68.409	344.909	411.069	437.775	460.501	1.722.663	Pusat Perfilman
SK .1.5173.1	Peningkatan kepercayaan antarwarga; (antara lain dengan membuka ruang dialog budaya, seni pertunjukan, festival (pengobatan tradisional, kuliner), olahraga masyarakat, permainan tradisional)								4.000	32.000	39.316	41.564	43.259	160.139	
IKK.1.5173.1.1	Dialog budaya dengan komunitas Perfilman Indonesia			8	48	48	48	48							
IKK.1.5173.1.2	Jumlah kecamatan yang memanfaatkan bioskop keliling untuk pemutaran film			220	1.470	1.470	1.470	1.470							
SK .1.5173.2	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perfilman								-	112.730	138.502	146.421	152.394	550.047	
IKK.1.5173.2.1	Sarana perfilman yang direvitalisasi			-	2	2	3	3							
IKK.1.5173.2.2	Sarana perfilman yang dibangun			25	56	56	56	57							
IKK.1.5173.2.3	Jumlah bioskop keliling dalam rangka pembangunan karakter bangsa			33	33	33	34	35							
SK .1.5173.3	Pengembangan kreativitas dan produktivitas pelaku film								19.500	109.000	133.919	141.577	147.352	551.348	
IKK.1.5173.3.1	Perfilman yang difasilitasi (termasuk film panjang, film pendek dan dokumenter)			7	20	25	30	35							
IKK.1.5173.3.2	Fasilitasi komunitas perfilman			5	48	48	48	48							
IKK.1.5173.3.3	Apresiasi film oleh masyarakat			34	68	102	136	170							
SK .1.5173.4	Peningkatan ketersediaan kualitas sumber daya manusia bidang perfilman								-	4.000	4.914	5.195	5.407	19.517	
IKK.1.5173.4.1	Jumlah peserta bimbingan teknis perfilman			30	68	102	136	170							
SK .1.5173.5	Pengembangan karakter dan jati diri bangsa melalui materi ajar untuk menghaluskan budi pekerti siswa								-	2.000	2.457	2.598	2.704	9.759	
IKK.1.5173.5.1	Pengkayaan materi ajar melalui media film			2	4	6	8	10							
SK .1.5173.6	Pendataan aset budaya khususnya perfilman								-	10.000	12.286	12.989	13.519	48.793	
IKK.1.5173.6.1	Data perfilman yang dikelola			2	2	3	3	3							
SK .1.5173.7	Penegakan hukum dalam kewenangan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman								-	2.000	2.457	2.598	2.704	9.759	
IKK.1.5173.7.1	Penanganan kasus perfilman			-	10	10	10	10							
SK.1.5173.8	Meningkatnya kualitas penyensoran film dan iklan film								44.909	73.179	77.217	84.833	93.163	373.301	
IKK.1.5173.8.1	Jumlah film dan iklan film yang disensor		46.000	46.100	46.200										
IKK.1.5173.8.2	Persentase sosialisasi dan koordinasi kebijakan penyensoran		92,00%	94,00%	94,00%										
IKK.1.5173.8.3	Jumlah fasilitasi kelembagaan dan keanggotaan		10	11	12										
XXXX	Peningkatan layanan pendidikan dan pelatihan pegawai								66.072	69.277	76.204	83.825	92.207	387.585	Pusdiklat
SK.1.XXXX.1	Terseleenggaranya pendidikan dan pelatihan pegawai								66.072	69.277	76.204	83.825	92.207	387.585	
IKK.1.XXXX.1.1	Jumlah aparaturnya Kemendikbud yang mengikuti Diklat jabatan, teknis dan fungsional														
IKK.1.XXXX.1.2	Dukungan manajemen dan pelaksanaan pengembangan tenaga kependidikan untuk seluruh jenjang pendidikan														
YYYY	Peningkatan layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan								50.000	50.000	55.000	60.500	66.550	282.050	Pusat ASK
SK.1.YYYY.1	Terseleenggaranya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan								50.000	50.000	55.000	60.500	66.550	282.050	
IKK.1.YYYY.1.1	Meningkatnya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan														

# **LAMPIRAN-2**

## LAMPIRAN II. KERANGKA REGULASI

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Peraturan Mendikbud mengenai Pengadaan Pegawai	Terlaksananya proses perencanaan dan pengadaan pegawai sesuai dengan kebutuhan jabatan	Biro Kepegawaian	Biro Hukor/Menpan-RB	
2	Peraturan Mendikbud mengenai Pembayaran Tunjangan Kinerja	Terlaksananya penyaluran tunjangan kinerja sesuai dengan hasil evaluasi jabatan	Biro Umum	Biro Kepegawaian/Menpan-RB/	
3	Peraturan Mendikbud mengenai penataan pegawai	Penataan pegawai di lingkungan Kemdikbud sesuai dengan kompetensi	Biro Kepegawaian	Biro Hukor/Menpan-RB	
4	Peraturan Mendikbud mengenai pedoman <i>Assessment</i> pegawai	Penilaian kompetensi pegawai			
5	Peraturan Mendikbud mengenai pembentukan <i>Assessment Center</i>	Terbentuknya <i>Assessment Center</i> sebagai unit yang melaksanakan penilaian kompetensi pegawai			
6	Peraturan Mendikbud mengenai Pedoman Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Terlaksananya pembinaan pegawai berbasis kompetensi			
7	Peraturan Mendikbud mengenai Prosedur Operasional Pendataan Pegawai	Pembangunan database pegawai yang akurat dan terkini			
8	Peraturan Mendikbud tentang pembinaan dan pengembangan SDM Aparatur	Terlaksananya pembinaan pegawai berbasis kompetensi			
9	Peraturan Mendikbud tentang tata kelola Kepegawaian	Terlaksananya pelayanan kepegawaian tepat waktu dan tepat sasaran			
10	Peraturan Mendikbud tentang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	Penyusunan Kebijakan teknis Pengelolaan data dan statistik pendidikan	Biro Hukum dan Organisasi	Kemenkumham	
11	Peraturan Mendikbud Tentang penyelenggaraan Ujian Nasional	Terselenggaranya seluruh program pembelajaran pendidikan nasional		Kemenkumham /Balitbang	



Sekretariat Jenderal,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Gedung C Lantai 2